poskota.co.id
poskotanetwork
@poskotanetwork
poskota
Harian Poskota
poskota.official

# POSKOTA
Media Independen

56 Tahun 1970-2026

KAMIS, 5 NOVEMBER 2026, 12 HALAMAN | JABODETABEK RP4.000 - LUAR JABODETABEK RP4.500 | TERVERIFIKASI DEWAN PERS NO: 979/DP-Verifikasi/K/IV/2022 | EDISI NO: 1.838.309

# Siapa Aktor Intelektual di Balik Penyadapan Presiden?

## Polri Didesak Bongkar Pemberi Perintah hingga Penyandang Dana



PENYADAPAN: Presiden Prabowo Subianto menyematkan Bintang Mahaputera Adipurna kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (¾). Eks Kapolri tersebut kini terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden. Sejumlah pihak mendesak pemerintah mengkaji pencabutan tanda kehormatan tersebut seiring proses hukum yang berjalan. (Istimewa)

**JAKARTA (Poskota)** - Siapa aktor intelektual di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto? Pertanyaan itu kini menjadi sorotan setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara yang menyentuh keamanan komunikasi dan martabat lembaga kepresidenan.

Sejumlah partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan PDI Perjuangan, kompak meminta penyidikan tidak berhenti pada para tersangka yang diduga terlibat langsung. Polisi didesak menelusuri pihak yang merancang operasi, memberikan perintah, mengendalikan pelaksanaan, hingga menerima hasil sadapan dan membiayai kegiatan tersebut.

Desakan itu muncul menyusul penetapan tiga jenderal sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mengapresiasi langkah Kapolri bersama jajaran Bareskrim dan Divisi Propam dalam menindak pihak-pihak yang diduga terlibat. Namun, ia mengingatkan pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh tanpa melihat pangkat, jabatan, maupun latar belakang institusi.

"Polri tidak boleh berhenti hanya pada eksekutor di lapangan atau oknum yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini. Bareskrim harus mengusut tuntas siapa pihak yang menjadi otak penggerak, pemberi perintah, maupun penyandang dana di balik aksi penyadapan ilegal ini," kata Sugiat dalam keterangannya, Rabu (4/11).

Menurut anggota DPR dari Fraksi Gerindra tersebut, sangat sulit diterima apabila tindakan yang menyasar sistem pengamanan Presiden dilakukan hanya atas inisiatif pribadi. Karena itu, penyidik harus mendalami kemungkinan adanya jaringan atau dukungan sistematis di balik dugaan penyadapan tersebut.

"Sangat tidak masuk akal jika tindakan nekat menembus pengamanan Presiden dilakukan atas inisiatif pribadi tanpa perintah atau backing sistemik. Jangan pernah giring narasi ini seolah-olah hanya kelakuan individu yang lepas kontrol," ujarnya.

Sugiat juga meminta penyidik menelusuri motif penyadapan, termasuk kemungkinan adanya kepentingan politik, upaya mengganggu stabilitas nasional, ataupun keterlibatan pihak eksternal. Alur komunikasi, penggunaan perangkat penyadapan, serta distribusi informasi yang diperoleh harus dibongkar.

"Perlu dilakukan pendalaman secara transparan mengenai motif di balik tindakan ini, apakah murni kejahatan informasi, motif politik untuk mengganggu stabilitas nasional, atau ada keterlibatan jaringan atau kepentingan pihak eksternal tertentu," tegasnya.

Ia menambahkan, Bareskrim perlu memastikan apakah ada keterlibatan institusi lain, pihak swasta, atau aktor tertentu yang memanfaatkan oknum untuk memperoleh informasi sensitif di lingkungan kepresidenan.

*Bersambung ke Halaman 11*

Buah Bibir

*Diana Pungky*

## Comeback ke Layar Lebar

AKTRIS senior Diana Pungky kembali menyapa penonton melalui layar lebar. Pemeran Jinny dalam sinetron Jinny Oh Jinny tersebut bergabung dalam film 5CM: Evolusi Hati produksi Soraya Intercine Films.

Diana mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima tawaran bermain dalam film tersebut. Dia mengatakan sudah cukup lama menantikan cerita yang bisa membangkitkan keinginannya untuk kembali menjalani proses syuting.

Selain tertarik dengan ceritanya, Diana mengungkapkan bahwa film 5CM versi pertama yang dibintangi Herjunot Ali merupakan salah satu film favoritnya sejak dahulu.

Dia juga merasa senang karena kesempatan ini membuatnya kembali berakting bersama sahabat lamanya, Cut Keke.



Mengenai pengalaman syuting, Diana mengaku sangat menikmati prosesnya. Kembali berada di lokasi syuting membuatnya merasakan sensasi seperti kembali muda dan membangkitkan kerinduannya terhadap dunia akting. **(tog)**

# Pejalan Kaki Tersungkur Diseret Jambret

## Kalung Emas 20 Gram Disabet Pelaku



**JAKARTA (Poskota)** - Aksi penjambretan kembali terjadi di wilayah Jakarta Pusat. Kali ini, seorang pria bernama Edison Siahaan menjadi korban penjambretan saat berjalan pagi bersama tiga rekannya di Jalan Samanhudi, Sawah Besar, Rabu (4/11) sekitar pukul 06.30 WIB.

Pelaku yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba mendekati korban dari arah belakang dan menarik kalung emas yang dikenakannya. Tarikan keras tersebut membuat Edison terjatuh ke jalan. Meski demikian, pelaku tidak berhasil membawa seluruh perhiasan milik korban.

Kapolsek Sawah Besar, Kompol Egy Irwansyah, mengatakan peristiwa itu terjadi ketika korban dan sejumlah temannya sedang mencari sarapan. Saat hendak menyeberangi jalan, pelaku datang menggunakan sepeda motor dan langsung merampas kalung korban. "Dia lagi jalan dipepet, lagi jalan pagi katanya nyari sarapan," ujar Egy kepada awak media, Rabu (4/11).

Akibat kejadian tersebut, Edison mengalami luka lecet karena terjatuh.

*Bersambung ke Halaman 11*

# Aksi Penolakan Konser Andrea Bocelli di JIExpo Kemayoran Ricuh

## 34 Orang Luka-luka

**JAKARTA (Poskota)** - Aksi penolakan terhadap konser penyanyi tenor dunia Andrea Bocelli di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (3/11) malam, berujung ricuh. Insiden pelemparan batu ke arah petugas pengamanan menyebabkan 34 orang mengalami luka-luka, terdiri atas 32 personel Polri, satu personel TNI, dan seorang warga sipil.

Sejumlah korban mengalami luka saat situasi di sekitar lokasi konser memanas. Seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis. Namun, tiga personel kepolisian masih harus menjalani perawatan lebih lanjut di rumah sakit.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, aparat gabungan telah melakukan pengamanan terhadap dua kegiatan yang berlangsung bersamaan di kawasan JIExpo, yakni konser Andrea Bocelli dan aksi penyampaian pendapat dari sejumlah elemen masyarakat yang menolak penyelenggaraan acara tersebut.

*Bersambung ke Halaman 11*

## Kopi Pagi Harmoko

Oleh: Azisoko



*"Mengatasi masalah lingkungan perlu kebijakan konkret, bukan sebatas gerakan moral berupa ajakan atau imbauan pemerintah. Masyarakat akan terlibat aktif menjaga lingkungan sekitar, jika kebijakan yang digulirkan pemerintah memihak dan memberi manfaat nyata bagi kehidupan mereka."*

*Harmoko*

### "Jadilah Seperti Bunga"

SERING kita dengar ungkapan bahwa bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya, karena dengan sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di sekelilingnya.

Kata mutiara Bung Karno ini mengandung pesan tentang pentingnya kualitas dan integritas diri, kerendahan hati, serta ketuhisan dalam berbuat baik untuk lingkungan sekitar, lebih luas lagi berbangsa dan bernegara.

Karakter ini pula yang hendaknya dikedepankan dalam menjaga dan merawat serta melestarikan kekayaan alam, termasuk keragaman hayati yang kita miliki.

Kita wajib bersyukur,Indonesia yang secara geografis berada di daerah tropis dan dilewati garis khatulistiwa, menjadikan negeri kita kaya keragaman hayati.

*Bersambung ke Halaman 11*

## JADWAL SALAT

| SUBUH | ZUHUR | ASAR | MARIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|
| 04.41 | 11.58 | 15.19 | 17.54 | 19.05 |

## SAAT SUAMI MENDEKAM DI PENJARA BINI DIDEKAMI PRIA ABDI NEGARA

NAH... ini dia




KETIKA suami harus menjalani kurungan penjara sebagai narapidana, Mira (40) di Pariaman, Sumbar, tiap hari, kesepian di rumah. Malam-malamnya kedinginan. Kesempatan itu digunakan oleh Yadi (45) untuk menjalankan aksinya. Mulanya, dia datang dengan membawakan oleh-oleh macam martabak, lain hari membawakan nasi bungkus, berikutnya membawa roti besar enak.

*Bersambung ke Halaman 4*

**Menghidupkan Asa dari Rak Buku**

# *Perpustakaan Si Atang Bantu UMKM Tangerang Naik Kelas*

**Penulis:** *Magang 1*

DERETAN buku tersusun rapi di rak-rak kayu, menanti tangan-tangan pembaca yang ingin merajut asa. Namun, di sudut Jalan Pepaya RT 02/RW 015, Garden City Residence, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, aroma kertas tidak lantas menjadi satu-satunya daya tarik. Lebih dari sekadar tempat meminjam lembaran cerita, Perpustakaan Si Atang telah bertransformasi menjadi laboratorium kehidupan dan lokomotif kemandirian ekonomi warga sekitar.

Berdiri sejak 2022, ruang literasi ini mendobrak batasan konvensional perpustakaan yang kerap dipandang kaku.

*Bersambung ke Halaman 11*



BACA: Sejumlah anak menunjukkan buku bacaan di area Perpustakaan Si Atang, Kelurahan Periuk, Kota Tangerang, Rabu (¾). (Istimewa)



## Haloo... Bang Jaki

Rubrik ini menampung keluhan atau kritik warga pada pelayanan publik, fasilitas umum dan lain lain. Kirim kritik dan keluhan anda ke WhatsApp: 081188098706

### Trotoar Jl Satria Raya Marak Dilintasi Motor

▶ Gubernur DKI. Jl Satria raya JKT barat agar dipasang pagar pembatas di atas trotoar spy pengendara motor jam kerja PGI hari TDK bisa lewat atas trotoar yg berbahaya bagi keselamatan pejalan kaki. Trima kasih. (083815980XXX)

### Tertibkan Bajaj Mangkal di bawah JPO Halte Busway Jelambar

▶ Petugas Dishub Jakarta Barat agar menertibkan Bajaj mangkal setiap pagi di bawah tangga JPO halte busway Jelambar, karena menggangu kenyamanan pejalan kaki. Terima kasih. (08381598Oxxx)

### PKL di Jalan Gorontalo Timbulkan Kemacetan

▶ Menjamurnya PKL di sepanjang Jalan Gorongtalo, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, kerap membuat kemacetan. Mohon Pak Wali Kota Jakarta Utara, Satpol PP, Camat dan lurah menertibkan. (083806512xxx)

### Pengerjaan Tutup Got di Gang MHT Asal

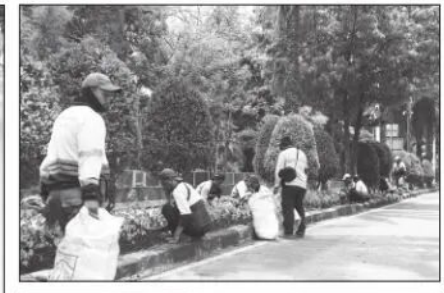
▶ Pemda DKI tolong pekerjaan saluran got terutama di gang MHT banyak pekerja yang sembarangan terutama dalam menyelesaikan pekerjaan tutup gotnya kanan kirinya diurug pakai puing dan atasnya pakai adukan yg asal asalan sehingga baru berapa bulan saja pada bolong jadi sangat menggangu sekali, mohon Pemda DKI untuk turun sidak ke wilayah pemukiman warga. Trims. (08161138xxx)




Poskota/Beritajakarta

**TATA JALUR HIJAU:** Sejumlah petugas Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan melakukan penataan jalur hijau di Jalan Harsono RM, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (2/11). Penataan dilakukan dengan menanam sekitar 40.000 tanaman pretty pink dan 136 pucuk merah untuk memperindah kawasan serta meningkatkan estetika lingkungan perkotaan. Sebanyak 14 personel Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan dikerahkan untuk mengerjakan penataan jalur hijau tersebut. Penataan jalur hijau dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih tertata dan menambah keindahan lingkungan.







## Stempel

Polri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo

***Masih dimuliakan jadi KSP kok nglunjak, tidak tahu hukuman apa yang setimpal**

Musisi senior sekaligus Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Dhani Ahmad Prasetyo atau Ahmad Dhani siap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

***Mending balik lagi fokus jadi musisi, tidak ada urusan dengan KPK, naluri berusia sudah mentok-kah?**

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menambah pemberhentian baru kereta api jarak jauh (KAJJ) di Stasiun Jatinegara, Bekasi, dan Cikarang.

***Bagus, bagi calon penumpang terasa rumit kalau ke St Gambir dan St Senen, mudah di Jatinegara.**

## SOSOK

Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin

# Mengawal Keterbukaan Informasi Publik

**POSKOTA –** Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu ukuran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal inilah yang terus didorong Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, terutama pada badan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, memberikan apresiasi terhadap komitmen seluruh kecamatan dan kelurahan di Jakarta dalam mengikuti Monitoring dan Evaluasi Elektronik (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026.

Sebanyak 267 kelurahan dan 44 kecamatan di Jakarta tercatat telah merampungkan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ). Capaian tersebut dinilai menjadi sinyal positif meningkatnya kesadaran badan publik di tingkat wilayah terhadap pentingnya keterbukaan informasi.

Bagi Luqman, kelurahan dan kecamatan memiliki posisi strategis karena menjadi garda terdepan pelayanan pemerintah. Setiap hari, kedua unsur pemerintahan tersebut berhadapan langsung dengan berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat.

Karena itu, akses terhadap informasi yang akurat, terbuka, dan mudah diperoleh warga menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan publik.

"Kami mengapresiasi kecamatan dan kelurahan yang telah berkomitmen dan serius mengikuti proses ini. Kami berharap kecamatan dan kelurahan di Jakarta mampu meraih predikat Informatif pada tahun ini," ujar Luqman dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11).

Menurutnya, rampungnya pengisian SAQ menunjukkan kesiapan badan publik dalam menyediakan akses informasi yang dibutuhkan masyarakat. Namun, keterbukaan informasi tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pemenuhan administrasi, melainkan harus diwujudkan dalam praktik pelayanan sehari-hari.

"Kelengkapan pengisian SAQ menunjukkan kesiapan kecamatan dan kelurahan se-DKI Jakarta dalam membuka akses informasi publik yang akurat dan responsif bagi warga," ungkapnya.

Saat ini, pelaksanaan E-Monev KI DKI Jakarta 2026 telah memasuki tahap verifikasi terhadap jawaban SAQ dan dokumen pendukung yang diunggah masing-masing badan publik.

Badan publik yang memenuhi standar penilaian selanjutnya berhak melanjutkan proses ke tahap presentasi. Pada tahapan ini, keterlibatan pimpinan menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan dalam penilaian.

Luqman pun mengingatkan agar komitmen yang telah ditunjukkan sejak pengisian SAQ tetap dipertahankan hingga seluruh rangkaian evaluasi selesai.

"Kami berharap komitmen yang sudah ditunjukkan sejak pengisian SAQ terjaga hingga tahap akhir," paparnya.

Baginya, keberhasilan keterbukaan informasi publik bukan semata-mata mengejar predikat Informatif. Lebih dari itu, keterbukaan harus menjadi budaya kerja pemerintahan sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh informasi dan mengetahui berbagai program serta pelayanan yang diselenggarakan pemerintah. **(den)**



Poskota/beritajakarta

Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin.

## SENTAL SENTIL Obrolan Warteg:

# Presiden Disadap, Kenapa Bisa Jadi Begini

**RAKYAT** terkesiap, presidennya disadap. Awalnya publik hanya menanggapi sebagai rumor semata, dengan beredarnya isu penyadapan yang dilakukan mantan petinggi Polri dengan sejumlah jenderal terhadap Presiden Prabowo.

"Masak iya sih presiden disadap, apalagi yang menyadap sangat paham betul soal masalah hukum, termasuk risiko penyadapan, terlebih kepada kepala negara.Begitu komentar sebagian masyarakat, termasuk tetangga saya via WA, Selasa sore, 3 November 2026," ujar bung Heri mengawali "Obrolan Warteg" bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.

"Publik baru percaya presidennya disadap setelah Mabes Polri memberi keterangan resmi," tambah Yudi.

Seperti diberitakan, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, salah satunya Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo. Penetapan tersangka diumumkan pada Selasa, 3 November 2026. Dua lainnya Irjen ASN dan Irjen EHS.

Ketiganya diduga melakukan penyadapan di luar tugas institusi kurun waktu pada 2025 hingga Oktober 2026, kata Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin saat jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa malam, 3 November 2026.

Komentar berbagai kalangan pun berdatangan merespons keterangan resmi Mabes Polri ini. Mulai dari rakyat paling bawah hingga para petinggi dan tokoh bangsa ini negeri ini, tak terkecuali mantan Presiden SBY melalui akun media sosialnya menyesalkan:Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apapun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral.

"Maffud MD, mantan Ketua MK dan Menko Polkam melalui akun media sosialnya mengaku tak habis pikir, jika LSP melakukan dugaan penyadapan terhadap RI-1. Diduga melakukan kejahatan terjahat, karena menyadap kepala negaranya sendiri," urai Heri.

"Sejumlah ahli, pakar dan elite politik juga menyesalkan aksi penyadapan kepada presidennya sendiri yang dinilainya bentuk pengkhianatan," kata Yudi.

"Pihak Istana, Presiden Prabowo sendiri seperti dijelaskan Mensesneg, Prasetyo Hadi, sudah memberikan petunjuk kepada Kapolri untuk dilakukan proses sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seobjektif mungkin, tanpa ada yang ditutup-tutupi," urai mas Bro.

"Betul rakyat menunggu siapa saja yang terlibat, siapa dalangnya, penyadapan ini untuk apa dan siapa, dilaporkan kemana saja. Rakyat wajib tahu," harap Heri.

"Kalian sendiri bagaimana menyikapi kasus penyadapan ini?," tanya Yudi.

"Hanya satu kata, terlalu. Presidennya sendiri kok disadap, kenapa bisa jadi begini," jawab Heri.

"Ini bukan hanya pelanggaran hukum dan hak asasi, tapi tak lepas dari soal etik dan moral," tambah mas Bro. **(Joko Lestari)**





Poskota/Istimewa

PELAJAR - Sebanyak 12 anggota PMR PMI DKI Jakarta dilepas untuk mengikuti program pertukaran pemuda bersama Palang Merah Jepang di Tokyo pada 5–11 November 2026.

## 12 Anggota PMR DKI Ikuti Misi Pertukaran Pemuda ke Jepang

**JAKARTA (Poskota)** – Sebanyak 12 anggota Palang Merah Remaja (PMR) PMI Provinsi DKI Jakarta mendapat kesempatan mengikuti program pertukaran pemuda internasional di Jepang. Kegiatan yang bekerja sama dengan Japanese Red Cross Tokyo Chapter tersebut berlangsung pada 5–11 November 2026.

Keikutsertaan mereka diharapkan dapat memperluas wawasan, menambah pengalaman di bidang kemanusiaan, sekaligus membangun hubungan persahabatan dengan generasi muda Jepang.

Keberangkatan delegasi dilepas Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim, yang merwakili Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Acara pelepasan berlangsung di Jakarta Pusat, Rabu (4/11).

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakannya, Ali menyampaikan bahwa program pertukaran tersebut menjadi sarana bagi generasi muda untuk belajar langsung mengenai persahabatan antarbangsa, kepedulian sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan.

"Melalui program ini, generasi muda Jakarta diharapkan memiliki wawasan global tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa. Pengalaman berinteraksi dengan generasi muda dari negara lain juga menjadi kesempatan untuk belajar menghargai perbedaan budaya dan memperkuat persahabatan," ujar Ali.

Ia berpesan agar para peserta menjaga sikap selama berada di Jepang serta membawa nama baik Jakarta dan Indonesia. Para delegasi diharapkan dapat memunjukkan perilaku santun, disiplin, dan bertanggung jawab, sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia.

Ali juga mengingatkan agar pengalaman yang diperoleh selama program tidak hanya menjadi kenangan pribadi. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat dibagikan dan diterapkan di lingkungan sekolah maupun masyarakat, khususnya dalam kegiatan kemanusiaan, kesiapsiagaan bencana, kepedulian lingkungan.

Ia turut mendorong PMI DKI Jakarta memperkuat pembinaan PMR melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, sekolah, dan orang tua. Pembinaan berkelanjutan dinilai penting untuk membentuk karakter, kepemimpinan, serta kepedulian sosial generasi muda.

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Beky Mardani menyebutkan, rombongan yang diberangkatkan ke Jepang terdiri atas 16 orang, yakni 12 anggota PMR dan empat pendamping.

Belasan anggota PMR tersebut merupakan perwakilan dari lima wilayah administrasi Jakarta, meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan.

Beky menyampaikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta, kepala sekolah, guru pembina, orang tua, serta pihak-pihak yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut.

Menurutnya, pertukaran pemuda ini merupakan bagian dari implementasi Tri Bakti PMR, terutama poin ketiga tentang mempererat persahabatan nasional dan internasional.

"Program pertukaran ini merupakan implementasi Tri Bakti PMR, khususnya Tri Bakti ketiga, yaitu mempererat persahabatan nasional dan internasional," kata Beky.

Sebelum keberangkatan, PMI DKI Jakarta telah memberikan pembekalan kepada para peserta melalui pemusatan latihan pada 10, 17, 24, dan 31 Oktober 2026 di Markas PMI Provinsi DKI Jakarta.

Pembekalan tersebut meliputi materi kepalangmerahan, pengenalan budaya, kedisiplinan, komunikasi, serta sikap yang perlu dijaga selama mengikuti kegiatan di Jepang.

Dalam agenda kunjungan, para peserta dijadwalkan mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang, Palang Merah Tokyo, Unit Donor Darah Palang Merah Tokyo, serta sejumlah sekolah menengah pertama dan atas.

Mereka juga akan mengikuti pembelajaran mengenai pertolongan pertama (first aid), kesiapsiagaan bencana, dan pembuatan makanan darurat.

Selain menambah pengetahuan tentang kegiatan kepalangmerahan, kunjungan ke Unit Donor Darah Palang Merah Tokyo diharapkan memberikan gambaran mengenai sistem pelayanan dan pengelolaan darah di Jepang.

Beky berharap hubungan kerja sama PMI dengan Palang Merah Jepang Daerah Tokyo dapat terus dikembangkan. Kerja sama tersebut diharapkan mencakup pendidikan kemanusiaan, kepalangmerahan, kesiapsiagaan bencana, pelayanan donor darah, serta peningkatan kapasitas generasi muda.

"Jadikan kesempatan ini sebagai pengalaman yang tidak hanya dapat dikenang, melainkan memberikan manfaat dan menginspirasi orang lain. Bawalah nama baik Jakarta serta Indonesia," tandasnya. **(den)**

# Pramono Angkat 3.418 CPNS Jadi PNS Jakarta

### ❍ 15 Orang Penyandang Disabilitas

**JAKARTA (Poskota)** – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengangkat 3.418 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Rabu (4/11).

Dari jumlah tersebut, 15 orang di antaranya merupakan penyandang disabilitas. Mereka ditempatkan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai kebutuhan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Pramono mengatakan, pengangkatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov DKI dalam mewujudkan birokrasi yang inklusif. Pemerintah, kata dia, harus memberikan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk berkontribusi dalam pembangunan.



Poskota/Magang 4

PELANTIKAN - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengangkat 3.418 CPNS menjadi PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Sebanyak 15 di antaranya merupakan penyandang disabilitas.

"Saya merasa sangat bangga bahwa Provinsi DKI Jakarta menjaga komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang inklusif, memberi kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk berkontribusi dalam pembangunan," kata Pramono.

Ia berharap kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta semakin terbuka. Terlebih, masih terdapat 88 formasi khusus disabilitas yang diharapkan dapat terisi pada tahun mendatang.

Kepada para PNS yang baru diangkat, Pramono juga berpesan agar mampu membawa semangat perubahan dalam birokrasi Jakarta, terutama dari kalangan generasi muda.

Menurutnya, para CPNS telah melewati masa percobaan sekitar dua tahun, termasuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar untuk membentuk karakter, meningkatkan kompetensi, serta memahami nilai-nilai dasar ASN.

"Saya menaruh harapan bahwa ASN Jakarta, terutama bagi yang muda-muda, bisa membawa angin perubahan untuk penguatan birokrasi yang ada di Jakarta," ujarnya.

Pramono mengingatkan bahwa status PNS bukan sekadar pencapaian karier, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab. Karena itu, seluruh pegawai diminta menjaga integritas, meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas, serta mematuhi kode etik.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan soliditas antarpersonel. Para PNS diharapkan bekerja secara inovatif dan responsif agar program pemerintah berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Saya berharap Saudara-saudara sekalian dapat berkarier dengan baik, mencapai karier tertinggi. Yang paling penting adalah bekerjalah dengan rasa bahagia," tuturnya.

Selain itu, Pramono meminta para pimpinan perangkat daerah memberikan pendampingan dan ruang pengembangan bagi PNS yang baru diangkat. Dengan dukungan tersebut, potensi pegawai diharapkan dapat berkembang dan memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. **(M4)**

## Polda Metro Sisir 400 Rumah Warga di Palmerah

### ❍ Petakan Masalah Lingkungan



Poskota/Polda Metro Jaya

PENDATAAN - Polda Metro Jaya bersama pemerintah daerah, TNI, dan perangkat kewilayahan mendatangi sekitar 400 rumah warga di Kelurahan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (4/11/2026).

**JAKARTA (Poskota)** – Polda Metro Jaya bersama pemerintah daerah, TNI, dan perangkat kewilayahan mendatangi sekitar 400 rumah warga di Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (4/11). Kegiatan ini dilakukan untuk memetakan persoalan lingkungan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Wakapolda Metro Jaya Irjen Adex Yudiswan mengatakan, pendataan tersebut bertujuan mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi dan kebutuhan warga. Dengan turun langsung ke lingkungan masyarakat, penanganan persoalan diharapkan lebih tepat sasaran.

"Kita datang ke sini bukan lagi berdasarkan katanya-katanya, tetapi berdasarkan kondisi nyata yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sini. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang mereka harapkan," ujar Adex dalam keterangannya, Rabu (4/11).

Dari hasil kunjungan dan dialog dengan warga, petugas menemukan sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian. Di antaranya kondisi sanitasi, penerangan jalan, akses jalan, serta pengelolaan sampah.

Selain itu, petugas turut mendata persoalan keamanan dan ketertiban lingkungan. Seluruh masukan tersebut akan dievaluasi dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk menentukan langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing.

"Seluruh informasi yang dihimpun akan dievaluasi dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah serta pihak terkait. Penanganan nantinya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kewenangan masing-masing instansi," jelas Adex.

Dalam kegiatan tersebut, warga juga mendapat pelayanan kesehatan. Tim medis disiagakan untuk melakukan pemeriksaan, termasuk mendatangi rumah warga yang membutuhkan bantuan medis tetapi memiliki keterbatasan untuk datang ke posko pelayanan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Melalui pendekatan langsung, polisi dapat mendengar persoalan warga sekaligus menjembatani kebutuhan mereka dengan instansi yang berwenang.

"Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat dan Kerja Melayani Jakarta, kami ingin memastikan kehadiran polisi tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga mendengar, memahami, dan membantu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pihak yang berwenang," kata Budi.

Adex menambahkan, aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan program pelayanan dan penanganan persoalan lingkungan. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara lebih terarah dan sesuai kondisi di lapangan. **(man)**

## Polisi Siapkan One Gate System di Kampung Boncos

**KEBAYORAN BARU (Poskota)** – Polda Metro Jaya berencana menerapkan sistem satu pintu atau one gate system di kawasan Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Langkah ini dilakukan untuk memperketat pengawasan sekaligus menekan peredaran narkoba di wilayah tersebut.

Wakapolda Metro Jaya Irjen Adex Yudiswan mengatakan, melalui sistem tersebut, aktivitas orang yang keluar masuk kawasan Kampung Boncos akan lebih mudah diawasi. Bahkan, pendatang yang tidak memiliki kepentingan jelas berpotensi menjalani pemeriksaan urine.

"Orang luar yang datang ke sini tanpa tujuan jelas, akan kita tes urine. Tujuannya agar orang luar tidak berani lagi datang ke sini untuk mencari narkoba," ujar Adex kepada awak media, Rabu (4/11).

Namun, Adex menegaskan bahwa penerapan kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan secara sepihak. Polda Metro Jaya terlebih dahulu akan meminta persetujuan masyarakat setempat agar pelaksanaannya tidak mengganggu aktivitas maupun kenyamanan warga.

"Penerapan one gate system ini tentu butuh persetujuan dan legitimasi dari warga setempat. Kalau warga tidak setuju, kita tidak bisa memaksakan," tegasnya.

Untuk mematangkan rencana tersebut, Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Kolaborasi itu diperlukan untuk merancang penataan lingkungan serta pola pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan kawasan.

"Kita akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan rekayasa penataan lingkungan ini," kata Adex.

Lebih lanjut, Adex mengakui Kampung Boncos selama ini memiliki citra negatif karena dikenal sebagai salah satu lokasi yang berkaitan dengan peredaran narkotika. Bahkan, narkoba disebut pernah relatif mudah ditemukan di kawasan tersebut.

Menurutnya, stigma sebagai kampung narkoba tetap berpotensi menimbulkan persoalan meskipun peredaran narkotika berhasil ditekan. Sebab, orang dari luar wilayah masih bisa datang dengan tujuan mencari barang terlarang tersebut.

Kondisi itu juga dikhawatirkan dapat memicu warga yang sebelumnya tidak terlibat dalam bisnis narkoba untuk ikut terjun ke dalamnya karena melihat adanya peluang permintaan.

"Risiko stigmanya besar. Bisa saja warga yang awalnya tidak jualan akhirnya tergugah untuk berjualan," pungkas Adex. **(man)**

## Honda HR-V Nyemplung ke Sungai Batanghari Gambir

**JAKARTA (Poskota)** – Sebuah mobil Honda HR-V tercebur ke Sungai Batang Hari setelah menabrak pembatas jalan di Jalan Hayam Wuruk, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (4/11) sekitar pukul 14.00 WIB.

Kecelakaan tunggal tersebut melibatkan mobil yang dikemudikan pria berinisial TS. Pengemudi diduga kehilangan kendali hingga kendaraan oleng ke kiri dan keluar jalur.

Kepala Seksi Kecelakaan Lalu Lintas Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompol Kharisma Arbita Bangsa, menjelaskan mobil awalnya melaju dari arah utara menuju selatan di Jalan Hayam Wuruk.

Saat mendekati salah satu gerai Indomaret, pengemudi diduga tidak mampu mengendalikan kendaraan hingga menabrak pembatas jalan dan masuk ke sungai.

"Sesampainya di dekat Indomaret tidak dapat mengendalikan kendaraan sehingga oleng ke kiri menabrak pembatas jalan kemudian masuk ke Sungai Batang Hari di tempat tersebut," ujar Kharisma dalam keterangannya, Rabu (4/11).

Meski mobil mengalami kerusakan cukup parah, kecelakaan tersebut dipastikan tidak menimbulkan korban luka.

Kharisma menyebut benturan menyebabkan sejumlah bagian kendaraan rusak. Bagian depan mobil mengalami kerusakan, bodi samping kiri penyok, sementara kaca pecah.

"Akibat kecelakaan, kendaraan minibus HR-V rusak pada bodi bagian depan, bodi samping kiri penyok dan kaca pecah," ucapnya.

Untuk menyelidiki penyebab kecelakaan, petugas telah mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Polisi juga memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) serta meminta keterangan sejumlah saksi.

Hingga kini, polisi masih mengumpulkan bukti dan keterangan untuk memastikan faktor yang menyebabkan pengemudi kehilangan kendali hingga mobil tercebur ke sungai. "Penyebab kecelakaan masih dalam proses lidik," ucap Kharisma. **(man)**



Poskota/Istimewa

EVAKUASI - Sebuah mobil Honda HR-V tercebur ke Sungai Batang Hari setelah diduga menabrak pembatas jalan di Jalan Hayam Wuruk, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026) silang.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI CIBINONG

**PANGGILAN SIDANG**
No. 425/Pdt.G/2026/PN Cbi.

Pada hari Kamis tanggal 05 (lima) bulan November tahun 2026 saya BENYAMIN SAMUEL TUANKOTTA, Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, atas perintah Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, ditunjuk guna untuk melaksanakan pekerjaan ini :

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA :

NYONYA JANDA TJIA LIE NJAN, bertempat tinggal di Jl. D Gg IV, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sekarang tak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat I ;

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di :

Pengadilan Negeri : Cibinong
Jalan : Jl. Tegar Beriman No. 5, Cibinong Kab. Bogor,
Pada tanggal : Kamis / 26 November 2026
Jam : 10.00 WIB

Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah register perkara No. 425/Pdt.G/2026/ PN Cbi, antara :

JOSIANDY WIBOWO ..... Sebagai ..... PENGGUGAT ;

Melawan :

NYONYA JANDA TJIA LIE NJAN Dkk, .....Sebagai ..... PARA TERGUGAT ;

Dan :

KPKNL BOGOR (KANTOR PELAYANAN ..... Sebagai ..... PARA TURUT TERGUGAT ;
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BOGOR) Dkk.

Demikianlah atas perintah tersebut pekerjaan ini saya jalankan melalui Panggilan Iklan.

Juru sita Pengganti,
TTD
B. SAMUEL TUANKOTTA

# Asep Lantik 154 Kepala Desa di Kabupaten Bekasi

Minta Utamakan Kepentingan Rakyat

**BEKASI (Poskota)** – Sebanyak 154 kepala desa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 resmi dilantik Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja. Mereka akan menjalankan tugas untuk masa jabatan 2026–2034.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (4/11).

Dalam kesempatan tersebut, Asep mengingatkan para kepala desa agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Ia juga meminta para pemimpin desa membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten.

"Ini awal mulanya kita bekerja. Pertama, kita harus amanah dan menjaga diri sebagai pemimpin kepala desa. Kita juga harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah," ujar Asep.

Menurutnya, kepala desa memiliki peran penting dalam mendukung program prioritas Pemkab Bekasi, terutama di bidang infrastruktur, kesehatan, dan perizinan.

Asep juga mendorong pemerataan pembangunan di seluruh desa. Ia berencana mengupayakan tiga titik pembangunan prioritas di setiap desa agar kebutuhan masyarakat yang mendesak dapat ditangani secara bertahap.

Ia menilai, masih terdapat desa yang rutin mengusulkan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi belum memperoleh realisasi sesuai kebutuhan.

"Saya ingin setiap desa mempunyai tiga titik pembangunan yang memang mendesak, dengan skala prioritas. Saya tidak mau ada desa yang setiap tahun ikut Musrenbang, tetapi tidak pernah mendapatkan pembangunan," ungkapnya.

Rencana pemerataan pembangunan tersebut akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Bekasi agar aspirasi masyarakat dan kebutuhan setiap desa dapat terakomodasi.

Selain pembangunan fisik, Asep juga menyiapkan program pelayanan langsung melalui kunjungan ke setiap kecamatan mulai Januari 2027. Kegiatan yang direncanakan berlangsung setiap Rabu itu akan menghadirkan layanan administrasi kependudukan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pendampingan bagi pelaku UMKM.

Pemkab Bekasi juga akan menyediakan informasi lowongan kerja secara daring dan memfasilitasi akses masyarakat terhadap peluang kerja di kawasan industri.

"Nanti setiap kecamatan akan ada pelayanan dasar untuk masyarakat desa. Ada pelayanan KTP, KK, PBB, UMKM, dan juga informasi lowongan kerja online. Saya ingin datang langsung ke masyarakat, bukan hanya menunggu mereka datang," jelasnya.

Asep berharap 154 kepala desa yang baru dilantik dapat menjadi penggerak pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar kepala desa merangkul seluruh warga tanpa membedakan pilihan politik dalam Pilkades. Menurutnya, masyarakat yang sebelumnya tidak memberikan dukungan tetap memiliki hak atas pelayanan dan perhatian yang sama.

"Semua adalah masyarakat saya. Saya berharap kepala desa yang terpilih juga memiliki empati kepada teman-teman kita yang belum terpilih, karena mereka juga akan menjadi bagian dari kita semua," katanya.

Asep menegaskan, jabatan kepala desa merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"Pemimpin itu ibadahnya adalah kebijakan. Karena itu, kita tekankan kebijakan yang diambil harus pro-rakyat," tandasnya. **(den)**

## Warga Keluhkan Jalan Cut Mutia Bekasi Rawan Kecelakaan

**BEKASI (Poskota)** – Jalan Cut Mutia, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, menjadi sorotan warga menyusul kecelakaan maut yang melibatkan truk molen pada Minggu (1/11). Kawasan tersebut dinilai rawan kecelakaan karena kendaraan kerap melaju dengan kecepatan tinggi.

Supriyo, petugas keamanan Kampus BSI, mengatakan kecelakaan di kawasan Jalan Cut Mutia bukan kali pertama terjadi. Insiden yang melibatkan kendaraan roda dua maupun roda empat disebut kerap berlangsung di jalur tersebut.

Menurutnya, kendaraan yang melintas dari arah persimpangan sering kali langsung melaju kencang setelah lampu lalu lintas berubah hijau. Kondisi ini dinilai membahayakan pengguna jalan lain.

"Dari sana itu kan lampu merah, kalau sudah hijau, mobil dan motor larinya sudah kencang semua, enggak ada yang pelan," kata Supriyo kepada Poskota.co.id saat ditemui di sekitar lokasi, Rabu (4/11).

Ia juga menyoroti kondisi persimpangan yang memiliki akses jalan relatif sempit. Akibatnya, kendaraan dari beberapa arah bertemu di kawasan tersebut sehingga berpotensi menimbulkan konflik lalu lintas.

Supriyo berharap instansi terkait mengevaluasi pengaturan lalu lintas di Jalan Cut Mutia. Langkah pencegahan dinilai perlu dilakukan agar kecelakaan serupa tidak kembali terjadi.

"Ya, saya kira itu sudah menjadi tugasnya, bagaimana caranya untuk mengatasi supaya jangan sampai terjadi hal seperti ini lagi. Memang kawasan sini rawan kecelakaan," ujarnya.

Sebelum kecelakaan truk molen pada 1 November 2026, insiden yang melibatkan truk juga pernah terjadi di Jalan Cut Mutia pada Juni lalu. Salah satunya kecelakaan di Simpang UNISMA pada 29 Juni 2026 yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka-luka. **(M3)**



RAWAN • Kondisi Jalan Cut Mutia di depan Kampus BSI, Rawalumbu, Kota Bekasi, yang dikeluhkan warga rawan kecelakaan akibat kendaraan melaju kencang, Rabu (4/11/2026).

## Empat Pemuda Culik dan Peras Pemotor di Cikarang

Pelaku Mengaku Intel Polri

**BEKASI (Poskota)** – Empat pemuda ditangkap jajaran Polres Metro Bekasi setelah diduga menculik dan memeras seorang pengendara sepeda motor dengan modus mengaku sebagai anggota intelijen Polri. Para pelaku meminta uang tebusan sebesar Rp10 juta kepada keluarga korban.

Kasus yang terjadi di wilayah Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, tersebut berhasil diungkap polisi kurang dari 24 jam setelah laporan diterima.

Kasi Humas Polres Metro Bekasi AKP Aliyani mengatakan, keempat tersangka masing-masing berinisial MIPCP (21), RHI (20), AF (21), dan MAP (18).

"Dari hasil penyelidikan, petugas berhasil mengamankan empat orang pelaku. Ini juga sekaligus wujud kesigapan petugas dalam memberikan perlindungan dan kepastian penanganan hukum bagi masyarakat," ujar Aliyani, Rabu (4/11).

Aliyani menjelaskan, peristiwa bermula ketika korban melintas di kawasan Kampung Jarakosta, Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat.

Saat itu, para pelaku menghentikan kendaraan korban dengan alasan korban diduga terlibat aksi balap liar. Mereka kemudian mengaku sebagai anggota intelijen Polri dan memaksa korban masuk ke mobil yang digunakan kelompok tersebut.

Di dalam mobil, korban mendapat intimidasi dan dipaksa menghubungi keluarga serta kerabatnya untuk meminta uang sebesar Rp10 juta. Uang tersebut disebut sebagai tebusan agar korban terhindar dari jerat hukum.

Karena khawatir terhadap keselamatan korban, pihak keluarga akhirnya memenuhi permintaan tersebut dengan mentransfer uang sesuai nominal yang diminta.

Setelah uang diterima, korban dilepaskan di jalan. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi.

Berbekal keterangan korban, saksi, serta penelusuran transaksi digital, tim penyidik bergerak melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap empat tersangka tanpa perlawanan.

Polisi turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu senjata api mainan yang diduga digunakan untuk menakut-nakuti korban, satu sepeda motor milik korban, dua telepon genggam, serta satu lembar bukti transaksi transfer uang tebusan Rp10 juta.

Dari pemeriksaan awal, polisi juga mendeteksi adanya dugaan keterlibatan dua orang lainnya. Saat ini, keduanya telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan masih diburu penyidik.

"Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku, mengamankan barang bukti, menelusuri keberadaan pelaku DPO serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk proses hukum lebih lanjut," pungkas Aliyani. **(den)**



SIAGA BENCANA • Polres Cimahi melaksanakan apel siaga bencana di Mako Polres Cimahi, Jalan Amir Machmud, Rabu (4/11/2026).

## 380 Petugas Gabungan Siaga Bencana di Cimahi-KBB

**CIMAHI (Poskota)** – Memasuki musim hujan, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) ditingkatkan. Sebanyak 380 personel gabungan dari kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dan unsur terkait disiapkan untuk menangani kemungkinan bencana.

Kapolres Cimahi AKBP Endy Desianto mengatakan, sejumlah kawasan telah dipetakan sebagai daerah rawan bencana, terutama longsor. Kesiapan personel diperlukan agar evakuasi dan penanganan warga terdampak dapat dilakukan dengan cepat.

"Kami tidak ingin menunggu bencana terjadi baru bergerak. Titik-titik rawan sudah kami petakan dan seluruh unsur disiapkan agar ketika ada kejadian bisa langsung turun bersama," ujar Endy seusai Apel Gabungan Tanggap Bencana di Lapangan SIM Polres Cimahi, Jalan Amir Mahmud, Rabu (4/11).

Menurut Endy, penanganan bencana membutuhkan kerja sama lintas instansi. Komunikasi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, BPBD, dan unsur lainnya harus berjalan cepat ketika laporan kejadian diterima.

"Begitu ada kejadian, informasi harus segera diteruskan kepada seluruh unsur. Setelah itu personel bergerak menyesuaikan kebutuhan di lokasi, terutama untuk menyelamatkan dan membantu masyarakat terdampak," katanya.

Selain longsor dan banjir, Endy mengingatkan potensi angin kencang yang dapat terjadi saat hujan deras. Masyarakat pun diminta ikut berperan dalam mendeteksi kemungkinan bencana sejak dini.

"Kalau melihat kondisi yang berpotensi membahayakan, segera laporkan agar bisa ditindaklanjuti sebelum menimbulkan korban," tuturnya.

Jajaran Bhabinkamtibmas juga diarahkan meningkatkan komunikasi dengan warga di kawasan rawan bencana. Imbauan kewaspadaan disampaikan, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi dalam waktu cukup lama.

Sementara itu, Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan, peralihan dari musim kemarau ke musim hujan perlu diantisipasi secara serius. Kondisi tanah dan saluran air setelah kemarau panjang dinilai dapat meningkatkan risiko bencana.

"Peralihan musim ini harus kita sikapi dengan kewaspadaan. Hujan deras bisa memicu longsor maupun genangan, sehingga masyarakat dan seluruh perangkat daerah harus siap menghadapi kemungkinan tersebut," kata Ngatiyana.

Sejumlah kawasan di bagian utara Kota Cimahi, seperti Cipageran dan Citeureup, menjadi perhatian dalam pemetaan wilayah rawan. Selain itu, aliran Sungai Cimahi dan Sungai Cigugur terus dipantau untuk mengantisipasi luapan air ketika hujan deras.

Ngatiyana menegaskan, kesiapsiagaan tidak hanya bergantung pada jumlah personel. Ketersediaan peralatan, jalur komunikasi, dan pembagian tugas juga harus dipastikan berjalan dengan baik saat kondisi darurat.

"Yang kami siapkan bukan hanya orangnya, tetapi juga peralatan dan sistem koordinasinya. Saat kejadian berlangsung, setiap unsur harus langsung memahami tugas masing-masing sehingga penanganan tidak terlambat," ujarnya.

Pemkot Cimahi juga tetap mewaspadai potensi gempa yang berkaitan dengan aktivitas Sesar Lembang. Karena itu, edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat perlu terus ditingkatkan.

Ngatiyana berharap tidak terjadi bencana selama musim hujan. Namun, seluruh pihak diminta tetap siap menghadapi kemungkinan terburuk agar dampak bencana dapat ditekan dan masyarakat terdampak segera mendapat pertolongan. **(gat)**

## Revitalisasi Tambak Pantura Bekasi Masuk Tahap Verifikasi

**BEKASI (Poskota)** - Proyek Strategis Nasional (PSN) revitalisasi kawasan tambak Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat di Kabupaten Bekasi mulai memasuki tahap verifikasi administrasi dan pemeriksaan teknis lapangan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi pun menyiapkan tim terpadu lintas perangkat daerah untuk mengawal pelaksanaan proyek tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, mengatakan pembentukan tim terpadu menjadi langkah awal sebelum dibentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus. Satgas tersebut nantinya bertugas mendukung dan memastikan seluruh tahapan revitalisasi berjalan sesuai rencana.

"Program revitalisasi Pantura Jawa Barat sudah memasuki tahap verifikasi. Tugas tim terpadu ini melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait. Selanjutnya, akan dibentuk Satgas untuk mendukung pelaksanaannya," ujar Endin, Rabu (4/11).

Berdasarkan dokumen perencanaan PSN yang berada di bawah koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pengembangan kawasan tambak di Kabupaten Bekasi mencakup lahan lebih dari 4.000 hektare. Wilayah yang menjadi salah satu fokus utama proyek tersebut berada di kawasan pesisir Kecamatan Muaragembong.

Besarnya cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan ini diperkirakan membuka peluang penyerapan tenaga kerja hingga puluhan ribu orang. Pemkab Bekasi berharap proyek tersebut dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi sekaligus membantu mengurangi angka pengangguran.

"Karena memang kawasan yang akan dikembangkan cukup luas yaitu sekitar 4.000 hektare lebih. Kebutuhan tenaga kerjanya diperkirakan mencapai puluhan ribu. Ini menjadi peluang yang harus kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat," ungkap Endin.

Dukungan terhadap pelaksanaan proyek nasional tersebut juga disampaikan Camat Muaragembong, Sukarmawan. Ia mengajak seluruh kepala desa dan tokoh masyarakat di wilayah pesisir untuk mulai mempersiapkan warga, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, masyarakat lokal harus memiliki keterampilan dan kemampuan yang memadai agar dapat terlibat langsung dalam proyek revitalisasi tersebut. Dengan begitu, keberadaan PSN tidak hanya membawa perubahan infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar.

"Proyek strategis nasional revitalisasi tambak Pantura ini sudah di depan mata dan akan segera dilaksanakan. Mari kita dukung bersama agar seluruh tahapan pembangunan berjalan lancar. Jangan sampai peluang ini disia-siakan. Masyarakat harus mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan agar bisa mengambil bagian," imbau Sukarmawan.

Sebagai informasi, program revitalisasi tambak Pantura Jawa Barat dirancang pemerintah pusat untuk menjawab sejumlah persoalan di kawasan pesisir utara Jawa Barat. Di antaranya mengatasi abrasi pantai, intrusi air laut, serta kerusakan lingkungan pesisir.

Selain aspek lingkungan, program ini juga diarahkan untuk memodernisasi kawasan tambak produktif guna meningkatkan hasil budidaya perikanan yang memiliki daya saing di pasar ekspor.

Secara keseluruhan, pengembangan PSN Pantura Jawa Barat mencakup empat kabupaten pesisir, yakni Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

Melalui pembentukan tim terpadu dan Satgas khusus, Pemkab Bekasi berharap pelaksanaan proyek revitalisasi tersebut dapat berjalan optimal. Kawasan pesisir Muaragembong pun diharapkan berkembang menjadi pusat akuakultur modern yang berkelanjutan, sekaligus membuka peluang kesejahteraan lebih luas bagi masyarakat setempat. **(den)**

Berita dari halaman 1

### Nah Ini Dia

Maka lama-kelamaan Mira dan Yadi kian akrab, dan Yadi mulai berani memberi tawaran mesra, Mira pun memberi sinyal positif. Ajakan ke ranjang pun diserujui. Jadilah pergumulan di kasur bukan suami istri itu.

Ya. saat suami mendekam di penjara

Bini didekami pria PNS alias abdi negara

Begitu sekali naik ranjang bersama, Yadi ketagihan dan ingin mengulangi lagi, seperti kecanduan. Dia makin tidak peka dengan lingkungan meski warga mulai mempergunjingkannya Yadi yang sudah sellau ingin mengulangi naik ranjang tak mendengarkan suara-suara di kalangan warga. Yang penting bisa ngasah pedang, kata lagu Iwan Fals.

Di kalangan warga mulai resah dengan aksi mesum Yadi dan Mira yang sedang ditinggal suami menjalani hukuman penjara. Terlebih-lebih h warga di lingkungan itu sangat agamis, maka sangat terusik dengan aksi Yadi yang makin rajin menyambangi rumah Mira.

Warga mencurigai mobil Yadi kerap parkir di rumah wanita tersebut. Yadi merupakan warga Lubuk Begalung, Kota Padang, sedangkan yang wanitanya warga Kota Pariaman.

Warga pun melakukan pengintaian di rumah tempat pasangan tersebut. Jarum jam menunjukkan pukul 02.30 WIB. Seorang pegawai negeri sipil (PNS) di salah satu kementerian digerebek warga saat sedang berduaan dengan pasangan bukan istrinya di sebuah rumah

Sehingga pada Kamis dini hari jelang subuh itu, kecurigaan itu akhirnya terbukti, dengan tertangkap basahnya pasangan itu dalam satu kamar. Mereka samasamamenutup diri di balik selimut karena masih belum mengenakanbaju alias bugil usai perang.

Pengakuan pasangan itu kepada aparatmi, bahwa mereka sudah sering melakukan hubungan haram tersebut. Meski mereka itu masih memiliki pasangan yang sah.

Si wanita mengaku sedang ditinggal suaminya karena masih menjalani penahanan sebagai narapidana.

Atas perbuatan mereka itu maka keduannya dikenakan Pasal 6 ayat 1, Junto Pasal 29 ayat 2 yaitu melakukan perbuatan zina. Keduanya akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Pariaman. **(Winoto Anung)**

# Pengendara RX-King Tewas di Jalan Jawilan

❍ Diduga Serempetan dengan Mobil Box

**JAWILAN (Poskota) –** Kecelakaan lalu lintas yang diduga melibatkan sepeda motor Yamaha RX-King dan mobil box terjadi di Jalan Raya Rangkasbitung-Cikande, tepatnya di Kampung Bendo, Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Selasa (3/11) malam.

Akibat kecelakaan tersebut, seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian, sementara rekannya yang dibonceng mengalami luka berat.

Korban meninggal dunia diketahui bernama Irfan (23), sedangkan korban luka berat bernama Ihwan (20). Keduanya merupakan warga Desa Majasari, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang.

Kapolsek Jawilan AKP Erwan Nurwanda mengatakan, kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 21.30 WIB. Saat itu, kedua korban mengendarai sepeda motor Yamaha RX-King bernomor polisi A 4089 VP dari arah Cikande menuju Rangkasbitung.

"Setibanya di lokasi kejadian, sepeda motor yang dikendarai korban diduga mengalami serempetan dengan mobil box yang datang dari arah berlawanan. Namun, untuk penyebab pasti kecelakaan masih dalam penanganan petugas," ujar Erwan kepada Poskota, Rabu (4/11).

Usai kejadian, mobil box yang belum diketahui identitasnya itu diduga langsung meninggalkan lokasi. Sementara kedua korban tergeletak di jalan dan memburuhkan pertolongan medis.

"Petugas bersama warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi kedua korban ke Puskesmas Jawilan untuk mendapatkan penanganan medis," jelas Erwan.

Namun, nyawa Irfan tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Jenazah korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa pulang. Sementara itu, Ihwan yang mengalami luka berat pada kaki sebelah kanan masih menjalani perawatan di Puskesmas Jawilan.

Erwan menambahkan, penanganan kasus kecelakaan lalu lintas tersebut selanjutnya dilimpahkan kepada Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Serang.

Petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan sekaligus mengungkap identitas mobil box yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. **(rah)**



Petugas Polsek Jawilan dibantu warga saat mengevakuasi korban kecelakaan lalulintas ke puskesmas setempat. Dok. Polsek Jawilan

## Tumpahan Minyak Sawit Bikin Jalan Kopo-Maja Licin

**KOPO (Poskota) –** Tumpahan minyak sawit dari sebuah truk tangki menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di Jalan Raya Kopo-Maja, tepatnya di Desa Mekar Baru, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Tumpahan tersebut membentang sepanjang sekitar 600 meter dan mengakibatkan sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh setelah kendaraan mereka tergelincir.

Truk tangki bernomor polisi N 8216 UQ yang mengangkut minyak sawit itu diduga mengalami kebocoran pada bagian tangki. Akibatnya, muatan minyak berceceran di sepanjang jalan sehingga permukaan aspal menjadi licin dan membahayakan pengguna jalan.

Kapolsek Kopo Iptu Aripin Simbolon mengatakan, pihaknya pertama kali menerima laporan warga melalui layanan Call Center 110 pada Selasa (4/11) sekitar pukul 23.30 WIB. Warga melaporkan adanya tumpahan minyak sawit yang menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor tergelincir dan arus lalu lintas mengalami kemacetan.

"Setelah menerima laporan dari masyarakat melalui Call Center 110, anggota langsung bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Kami mendapat informasi bahwa sejumlah pengendara motor terjatuh akibat jalan yang licin," ujar Aripin kepada Poskota, Rabu (4/11).

Setibanya di lokasi, petugas Polsek Kopo bersama warga langsung menaburkan pasir di atas tumpahan minyak. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi tingkat kelicinan jalan sekaligus mencegah bertambahnya jumlah pengendara yang terjatuh.

Namun, karena tumpahan minyak masih membahayakan pengguna jalan, petugas kemudian meminta bantuan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk melakukan penyemprotan di sepanjang ruas jalan yang terdampak.

"Karena tumpahan minyak cukup panjang dan masih membahayakan pengendara, kami meminta bantuan petugas Damkar untuk menyemprot jalan agar sisa minyak sawit dapat dibersihkan dan kondisi jalan kembali aman dilalui," jelas Aripin.

Aripin menjelaskan, truk tangki tersebut mengangkut minyak sawit yang rencananya akan dikirim ke wilayah Bogor melalui jalur Jasinga.

Setelah dilakukan penanganan bersama petugas Damkar dan warga, kondisi jalan yang sebelumnya licin dan mengalami kemacetan kini telah kembali normal.

"Kami mengimbau para pengemudi kendaraan angkutan barang agar selalu memastikan kondisi kendaraan, khususnya tangki dan muatan, dalam keadaan aman sebelum melakukan perjalanan. Ini penting agar tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya," tandasnya. **(rah)**

## Tiga Terduga Pelaku Curanmor di Tangerang Ditangkap di Pandeglang

**TANGERANG (Poskota)** - Pelarian tiga orang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Tanah Tinggi, Kota Tangerang, berakhir setelah ditangkap Tim Opsnal Jatanras Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Ketiganya diamankan di Jalan Raya Sobang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Selasa (3/11/2026).

Pengungkapan kasus ini berawal dari pencurian satu unit sepeda motor Honda CBR milik warga di Jalan Supriadi, RT 01 RW 05, Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, pada 26 Oktober 2026.

Berdasarkan rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi, polisi mengidentifikasi tiga orang yang diduga mengambil sepeda motor tersebut.

Berbekal hasil penyelidikan dan petunjuk dari rekaman CCTV, Tim Opsnal Jatanras kemudian menelusuri keberadaan para terduga pelaku hingga ke wilayah Sobang, Kabupaten Pandeglang.

Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Parikhesit mengatakan, ketiga pria berinisial R, AS, dan A itu langsung dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

"Beberapa barang bukti yang kami sita yakni satu buah kunci T beserta tujuh mata kunci, dua unit telepon genggam, tiga pelat nomor kendaraan, satu unit Honda Beat yang diduga digunakan sebagai sarana pencurian, serta beberapa sepeda motor lainnya," katanya, Rabu (4/11).

Lebih lanjut, penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan para terduga pelaku dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor lainnya.

"Para terduga pelaku disangkakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," pungkasnya. **(ver)**

## Polresta Tangerang Bakal Razia Penggunaan Vape dan Pod

**TANGERANG (Poskota)** - Polresta Tangerang akan menggelar razia penggunaan rokok elektrik atau vape dan pod di lingkungan Mapolresta Tangerang. Langkah tersebut dilakukan menindaklanjuti instruksi Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto melalui Surat Edaran (SE) Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape/Pod) di Lingkungan Polri.

Kasi Propam Polresta Tangerang, Ipda Mohamad Irfan Fauzi, mengatakan larangan penggunaan vape atau pod tidak hanya berlaku bagi anggota Polri, tetapi juga masyarakat sipil yang sedang berada di lingkungan Mapolresta Tangerang.

"Jadi, larangan ini bukan cuma untuk anggota Polres saja, tetapi juga berlaku bagi masyarakat yang tengah berkunjung. Untuk saat ini, karena edarannya baru dikeluarkan, kami masih menggencarkan sosialisasi," kata Irfan, Rabu (4/11).

Irfan menyebutkan, larangan penggunaan rokok elektrik tersebut tidak hanya berlaku di lingkungan kerja, tetapi juga di luar lingkungan kerja.

Menurut dia, anggota yang kedapatan menggunakan vape atau pod saat razia maupun inspeksi mendadak (sidak) akan diberikan teguran secara bertahap.

"Kalau nanti ditemukan saat razia atau sidak, teguramnya tidak langsung berupa sanksi disiplin, tetapi bertahap. Akan diingatkan, lalu diberikan teguran fisik seperti push-up, sit-up, ataupun lari," ungkapnya.

Selain itu, Irfan menegaskan, anggota yang kedapatan membawa atau menggunakan rokok elektrik dengan kandungan narkoba jenis etomidate akan dikenakan sanksi disiplin hingga pidana.

"Kalau misalnya nanti ada anggota yang sedang menggunakan vape, akan kami tes urine untuk melihat kandungan liquid-nya. Kalau mengandung narkoba, tentunya bukan cuma dikenakan sanksi disiplin, tetapi juga bisa diproses melalui kode etik ataupun pidana," pungkasnya. **(ver)**

## Aktivis Pandeglang Dukung Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah

**PANDEGLANG (Poskota) –** Sejumlah aktivis di Kabupaten Pandeglang, Banten, menyatakan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan madrasah yang diharapkan dapat dilakukan oleh Kepala Seksi (Kasi) Madrasah yang baru di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pandeglang.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua Aktivis Barakuda Abdul Aziz dan Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Banten (AMPB), Ilham Kamil.

Ketua Barakuda, Abdul Aziz, mengatakan dukungan tersebut merupakan bentuk harapan agar pejabat baru mampu membawa perubahan positif bagi dunia pendidikan madrasah di Kabupaten Pandeglang.

Menurutnya, perubahan tersebut diharapkan mencakup peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan.

"Perubahan dan peningkatan baik dari sisi kualitas pembelajaran, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, maupun sarana dan prasarana pendidikan," ungkapnya, Rabu (4/11).

Dia menilai madrasah memiliki peran penting dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki karakter, akhlak, serta pemahaman keagamaan yang kuat.

Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan madrasah perlu menjadi perhatian bersama. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan pembinaan terhadap lembaga pendidikan, pemerataan fasilitas, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, Ketua AMPB, Ilham Kamil, berharap pejabat baru di lingkungan Kemenag Pandeglang dapat membangun komunikasi dan sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan, aktivis, serta pemerhati pendidikan.

Menurutnya, komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak diperlukan agar persoalan yang selama ini dihadapi lembaga pendidikan madrasah dapat diidentifikasi dan dicarikan solusinya secara bersama-sama.

"Membangun koordinasi dengan semua elemen itu penting. Memajukan dunia pendidikan bukan hanya kewajiban pemerintah semata, namun elemen masyarakat juga punya peran dalam hal ini," tuturnya.

Ilham juga berharap peningkatan mutu pendidikan madrasah di Kabupaten Pandeglang tidak hanya menjadi program administratif, tetapi benar-benar diwujudkan melalui langkah nyata dan berkelanjutan.

"Dengan begitu, ke depan madrasah di Kabupaten Pandeglang mampu semakin berkembang dan memberikan kontribusi dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas," tandasnya.

Diketahui, pejabat yang baru dilantik untuk menduduki jabatan Kepala Seksi Madrasah di lingkungan Kemenag Kabupaten Pandeglang adalah Tati Jumiati.

Pergantian jabatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk menghadirkan terobosan baru dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan madrasah di Kabupaten Pandeglang. **(fat)**



Petugas gabungan berjaga di kawasan Jalan Ahmad Yani, Pasar Anyar, Kota Tangerang, dalam rangka pengawasan pascarelokasi PKL, Rabu (4/11). Poskota/Rizki Gopak

## Pemkot Tangerang Siapkan Tiga Posko

❍ Cegah PKL Kembali Berjualan di Jalan Ahmad Yani

**TANGERANG (Poskota) –** Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menyiapkan tiga posko pengawasan di kawasan Jalan Ahmad Yani, sekitar Pasar Anyar, untuk mencegah pedagang kaki lima (PKL) kembali berjualan di badan jalan setelah direlokasi ke dalam Gedung Pasar Anyar, Rabu (4/11).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang, Teguh Supriyanto, mengatakan pengawasan akan dilakukan secara bergiliran dengan melibatkan personel gabungan dari Satpol PP, Trantib Kecamatan Tangerang, TNI, dan Polri.

Tiga posko tersebut rencananya ditempatkan di depan Apotek Miranti, bagian tengah kawasan, serta di depan Pasar Anyar. Selain berjaga di posko, petugas juga akan melakukan patroli secara berkala mulai pagi hingga malam hari.

"Jalan Ahmad Yani tadi sudah kami sisir dari pedagang-pedagang yang ada. Kami mengembalikan fungsi jalan untuk kepentingan umum," ujar Teguh.

Dia menegaskan, pemerintah tidak akan mengizinkan pedagang kembali menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan karena dapat mengganggu ketertiban umum.

"Tempat sudah disiapkan di Perumda Pasar. Yang berulang kali kami sampaikan, tidak sehat berjualan di jalan, apalagi sampai menggunakan badan jalan," katanya.

Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) I Kota Tangerang, Mulyani, menjelaskan bahwa pedagang yang sebelumnya berjualan di sepanjang Jalan Ahmad Yani dan Jalan Kiasnawi diarahkan untuk menempati area perdagangan di dalam Gedung Pasar Anyar.

Langkah tersebut dilakukan agar aktivitas jual beli tidak lagi mengganggu fungsi jalan dan trotoar.

"Harapannya, kondisi di sekitar Pasar Anyar, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Kiasnawi bisa kembali sesuai fungsinya. Jalan dan trotoar dapat digunakan sebagaimana mestinya," tutur Mulyani.

Menurutnya, penempatan pedagang di dalam gedung pasar juga menjadi upaya pemerintah menyediakan tempat berjualan yang lebih tertata sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi para pedagang.

"Sementara para pedagang bisa berjualan di dalam Gedung Pasar Anyar yang sudah kita bangun," ujarnya. **(M1)**

## Inflasi Kota Tangerang Terendah di Banten

**TANGERANG (Poskota) –** Inflasi Kota Tangerang tercatat sebagai yang terendah di Provinsi Banten pada Oktober 2026, yakni sebesar 2,13 persen secara tahunan (year on year).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kota Tangerang secara bulanan (month to month) tercatat sebesar 0,16 persen. Sementara itu, Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 110,52.

Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tangerang, Ruta Ireng Wicaksono, mengatakan capaian tersebut menunjukkan penurunan inflasi dibandingkan September 2026. Menurutnya, kondisi itu menjadi kabar baik bagi stabilitas perekonomian daerah.

"Kabar baik dari stabilitas perekonomian daerah ini bisa dilihat dari indeks inflasi Kota Tangerang yang mengalami sedikit penurunan," ujarnya, Rabu (4/11).

Ia menjelaskan, inflasi tahunan Kota Tangerang turun dari 2,66 persen pada September menjadi 2,13 persen pada Oktober 2026. Adapun inflasi bulanan juga menurun dari 0,27 persen menjadi 0,16 persen.

"Kalau dilihat perbandingannya dengan bulan sebelumnya (September), indeks year on year dari 2,66 persen menjadi 2,13 persen, sedangkan month to month dari 0,27 persen menjadi 0,16 persen," katanya.

Meski mengalami penurunan, sejumlah komoditas pangan masih memberikan tekanan terhadap inflasi di Kota Tangerang. Cabai merah menjadi salah satu komoditas dengan kenaikan harga tertinggi, yakni mencapai 20,42 persen, disusul cabai rawit sebesar 4,48 persen.

Ruta menyebut kenaikan harga cabai masih menjadi salah satu penyumbang inflasi, seperti pada periode sebelumnya. Kondisi tersebut juga terjadi secara serentak di sejumlah daerah.

"Komoditas penyumbang inflasi masih sama dengan bulan sebelumnya, kenaikan harga sejumlah bahan pokok, terutama harga cabai yang memang sedang melonjak serentak di semua daerah," tambahnya.

Pemerintah Kota Tangerang terus memantau pergerakan harga dan ketersediaan pasokan bahan pokok di pasaran. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga hingga menjelang akhir tahun. **(M1)**



Suasana pedagang sayur di pasar Tradisional Kota Tangerang. Poskota/Tangerang

# Kiky Saputri Minta Maaf Usai Video Lawas

**JAKARTA (Poskota)** - Komika Kiky Saputri memberikan klarifikasi terkait video lamanya saat menaiki jet pribadi dan mengucapkan istilah "rakyat jelata" yang kembali viral di media sosial.

"Assalamualaikum wr. wb. Aku ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai video lama yang belakangan ini kembali beredar dan menimbulkan berbagai tanggapan. Pertama-tama, aku ingin meminta maaf kepada teman-teman yang merasa tersinggung dengan ucapan dalam video tersebut," tulis Kiky, dikutip Rabu (4/11).

Dia kemudian menjelaskan bahwa saat itu dirinya bersama sejumlah pengisi acara diundang untuk menghadiri peresmian Bandara Internasional Kertajati. Dalam perjalanan tersebut, mereka berkesempatan menggunakan pesawat yang sama dengan Menteri Perhubungan saat itu.

"Sebagai konteks, video tersebut diambil pada tahun 2023, ketika aku bersama beberapa pengisi acara lainnya diundang untuk menghadiri peresmian Bandara Internasional Kertajati. Dalam perjalanan tersebut, kami berkesempatan berada dalam satu pesawat bersama Menteri Perhubungan saat itu," jelas dia.

Kiky menegaskan, penggunaan istilah "rakyat jelata" dalam video tersebut sebenarnya dimaksudkan sebagai sindiran terhadap fenomena pamer kemewahan atau flexing, bukan untuk merendahkan masyarakat.

Dia juga menjelaskan bahwa dirinya merupakan seorang komika yang kerap menggunakan gaya roasting, candaan, dan sarkasme dalam menyampaikan sindiran.

"Begitu pula dengan ucapan dalam video tersebut, termasuk penggunaan istilah "rakyat jelata", yang sebenarnya aku maksudkan sebagai sindiran terhadap fenomena flexing pada saat itu, dan bukan untuk merendahkan masyarakat. Karena aku pun memposisikan diri sebagai 'rakyat jelata' yang baru pertama kali naik private jet," tambah Kiky.

Meski demikian, Kiky menyadari bahwa maksud yang ingin disampaikan seseorang belum tentu sama dengan persepsi orang lain yang mendengarnya.

"Melalui penjelasan ini, aku ingin memberikan konteks yang lebih utuh, sekaligus menyampaikan permintaan maaf atas ucapan yang telah menyinggung teman-teman. Hal ini menjadi pelajaran besar," ungkap dia.

Kiky juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kritik dan masukan. Menurutnya, berbagai tanggapan tersebut menjadi pengingat untuk terus belajar dan memperbaiki diri.

"Terima kasih untuk setiap kritik dan masukan yang disampaikan. Semuanya menjadi pengingat untuk aku agar terus belajar dan menjadi lebih baik," pungkas Kiky. **(tog)**



# Sandy Tumiwa Suarakan Gerakan Anti Perundungan

## Lewat Film Aku Bukan Musuhmu, Tapi Aku Sahabatmu

**JAKARTA (Poskota)** - Sandy Tumiwa mengangkat isu perundungan atau bullying melalui film layar lebar bertajuk Aku Bukan Musuhmu, Tapi Aku Sahabatmu. Film tersebut diproduksi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Dalam proyek ini, Sandy juga berencana menggandeng Duta Pariwisata Jawa Barat, Vera Novia, untuk turut menyuarakan gerakan anti-bullying. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pesan positif kepada generasi muda.

Sandy menilai persoalan bullying tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak sekolah dan orang tua. Menurutnya, diperlukan kepedulian dari berbagai kalangan agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan saling menghargai.

"Saya ingin mengajak lebih banyak figur publik, generasi muda, dan tokoh inspiratif untuk bersama-sama menyuarakan bahwa bullying harus dihentikan," katanya.

"Anak-anak Indonesia berhak tumbuh dengan rasa aman, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan," lanjutnya.

Selain membawa pesan kemanusiaan, Sandy berharap proyek film tersebut dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi daerah melalui kegiatan kreatif dan positif.

Film Aku Bukan Musuhmu, Tapi Aku Sahabatmu diproduksi di Kabupaten Kuningan dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Proyek ini juga digagas bersama Kanjeng Gusti Sultan Sepuh Cirebon, Pangeran Kuda Putih.

Melalui film tersebut, Sandy ingin memperkenalkan Kuningan tidak hanya dari sisi keindahan alam dan pariwisata, tetapi juga melalui karya kreatif yang mengangkat pesan sosial.

Dia berharap gerakan anti-bullying dapat terus berlanjut dan tidak berhenti setelah proses produksi film rampung.

Terkait rencana kerja sama dengan Vera Novia, Sandy menegaskan bahwa kolaborasi tersebut belum resmi terealisasi. Meski demikian, dia berharap semakin banyak figur publik dan masyarakat yang bersedia terlibat dalam menyuarakan gerakan anti-bullying.

"Jangan hanya menjadi penonton ketika bullying terjadi. Mari menjadi bagian dari solusi. Karena setiap anak berhak mendapatkan persahabatan, bukan permusuhan," pungkasnya. **(tog)**



# IKLAN BARIS

## TARIF IKLAN POSKOTA

**Iklan umum/Display BW:**
Rp 40.000/mmk

**Iklan kolom Uk. 50 s/d 450 mmk:**
Rp.20.000/mmk.

**(Pengumuman, Laporan Keuangan, Cong Ad, Dukacita/ Iklan Keluarga)**

**Iklan warna:**
**Full colour**
Rp 60.000/mmk.
**Advertorial (FC)**
Rp 60.000/mmk
**Advertorial (BW)**
Rp 40.000/mmk.

**Iklan baris umum:**
**Rp 17.000/baris**
sudah termasuk PPN.
minimal 5 baris, maksimal 10 baris.
1 Baris = 26 karakter, termasuk spasi, dan tanda baca.

**Iklan mini khusus dan bergambar**
Rp 100.000,- = 125 karakter

**Iklan Lowongan**
Rp 30.000/baris
minimal 5 baris maksimal 10 baris
1 baris = 30 karakter termasuk spasi dan tanda baca.

Iklan mini salah muat atau tidak termuat, semata-mata karena kesalahan teknis. Teks iklan tanggungjawab pemasang/ bukan tanggungjawab penerbit.

**Alamat Tata Usaha/Iklan/Keagenan:**
Jl. Bang Pitung No. 22
Sukabumi Utara Kebon Jeruk Jakbar
Telepon: 021-22129129 (Hunting)

**No. REKENING Pos Kota**
Bank BNI 46 Cab. Harmoni PT Media Antarkota Jaya Norek: 182.900.75

Bank Mandiri Cab.Duta Merlin PT Media Antarkota Jaya Norek: 121.000.3031.428

Bank BCA Cab.Gajah Mada PT Media Antarkota Jaya Norek: 012.303.4314

**Halaman khusus mini (island adv)**
- Display Pulau BW Rp 40.000/mmk (min 450mmk)
- Display Pulau FC Rp 60.000/mmk (min 1080mmk)

### Biro Jasa

**CV.MARANFI URUS; STNK, BM, BBN, Mutasi, Akte Notaris, SK Kehakiman, PT, CV, DLL.** (Antar Jemput/Selesai Bayar) Hub: 081510351919

### Hiburan

**WAYANG MILENIAL INDONESIA** - Pentas di Marakas Square - Pondok Ungu Permai Bekasi - Kl Gunarto Gunotalljenoro - Anoman Takon Bopo - Tgl 07 Nov 2026 jam 20.00

POSKOTA SEMAKIN DEKAT DENGAN KITA...

### Kehilangan

**HILANG AJB** No. 05/2022 dan 06/2022. An. KUSWATI YUNI ASTUTI Luas 150M² dan 150M². Letter C No: 55 Persil 48 DJI. Kel. Gondrong Kec. Cipondoh Kota Tangerang

**HILANG BPKB** Mobil Tyt Avanza Th'2015 Silver metalik, B 2539 SKG, Noka/MHKM5EB 3JFK001773, Nosin:1NRF 046242 A/n Teguh Cahyadi

**HILANG KARTU** KlrB9182BEL/ JKT807691B9059UYZ/Jkt1414150 B9676UIX/ JKT1721813 B965SUWX/ JKT2222295 buntut JKT1827140 JKT1807761 JKT1725251 PT GMK, Darwin S

**HILANG BPKB** NoPol B 5309TLO Noka: MH33G5670NK234052 Nosin: G3LBE1284185 Nila Nurmala Laya

**HILANG SHM** dengan No: 28.03.08. 14.1.00479 luas: 3.268 m² letak di desa Girimukti, kec cimarga, kab. lebak Banten an. H Ahlan

**HILANG SHM** Nib: 09.03. 00036529.0 Luas 86 M2 dan SHM Nib : 09.03.000 36660.0 Luas 438 M2 an.Harliman Jaya Saputra tertetak di JLE.1 89 Rt.001 Rw.03 Kelapa Dua, Kebun Jeruk Jakbar

**KARTU KIR** : B9946JZ. JKT4595879 Junaisih B9450UPA. BD142322 Anggi

**HLG SHM** no779/ Pondpalwad Utara SU 15-7-11 No.694/2011 L.83m2 an Agus Setiawan brkt SHT No.2835/2012 No982/2012 tgl 15/212 an BTN

**KEHILANGAN DI TERMINAL DEPOK MARGONDA** Telah hilang dompet warna coklat berisi STNK B 1524 PJG, B 2945 PFC, SIM A & C a.n.Hanif, kartu BPJS, Kartu NPWP, dll. Bagi yang menemukan hubungi: 081289744744 (ada imbalan)

**TELAH HILANG** Berupa Asli Akta Sewa Menyewa Tanah Kota Praja No.JS6/85 a/n MUHAMAD ABDULAHANAN, Letaknya dijl Tanah Tinggi L Gg.Kr. Kecubung Kel.Kramat Jakarta

**KEHILANGAN KIR TEMPELAN** Jkt2101872 PT selamat argo logistik B9847 teu jkt1634507 A/n Margonda se

**TELAH HILANG** kir head B9069UIV dg JKT1430278 a/n PT. Pancaran Darat Transport

**TELAH HILANG** Sertifikat Hak Milik No:12144 A/N MUDJIONO Lok:Jl.Swadaya 3 No.48 Rt7/2 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat

**TLH HLG** bpkb toyota kijang th2000 B7615JIah Suri Chairani Ambri Jl.Dalang gg.semar Jaktim rangk:MHF11KF 83Y0018854 msn:7K0358069




**TOYOTA KIJANG** Innova 2.4V A.T 2017 Warna Silver Metalik, kondisi mulus, tangan pertama. Hub. +62 859-4352-3486.




**ADA DICARI** Mobil Segala Jenis,Tahun 1995 s/d 2026. BPKB Asli/Duplikat Hub. Mas Tlp 0812 890 7676 / 0812 857 60800 Tangerang

### Pemberitahuan

**PENJUALAN BAWAH** tangan Eksekusi Jaminan Fidusia : Honda Beat 2025 Honda Vario 125 2025 Iel Tyranno Yamaha Mio M3 2017 Yamaha X9R 2025 Yamaha X9R 2026 2026 Hub. 021- 55753749.

### Pemberitahuan

**PENJUALAN BAWAH** tangan Eksekusi Jaminan Fidusia : Daihatsu Ayla 2025 Daihatsu Ayla 2026 Daihatsu Sigra 2023 Daihatsu Sigra 2024 Honda CR-V 2010 KIA SONET 2023 Suzuki Baleno 2024 Suzuki New Carry PU 2022 Suzuki XL 7 2024 Toyota Avanza 2019 Hub. 021- 55753749.

poskotaofficial
poskota.co.id
poskotaofficial

### PASANG IKLAN BARIS POSKOTA

GRATIS di POSKOTA ONLINE
Harian Pagi Poskota.co.id Dan E-Paper

**Daftar Biro Di Wilayah Anda**

**BODETABEK**

**VINAMU ADS**
Perumahan Paradise Park Residence Blok G No.8 (samping pom bensin sulang) Sepatan, Tangerang 15520. Hp. 081617010979. Email: vinamuads@gmail.com

**BINTANG EMAS**
Alamat : Jln. Alamanda Indah Harapan Indah Bekasi PhiFax: -HpWA: 0812 2222 7377 Email: bintangemas7@gmail.com

**RESTU MULYA ABADI**
Alamat : Jl.Bina Asih 2 No.14 Jatiasih Bekasi Selatan PhiFax: - HpWA: 081808175569 / 081318001212 Email: iklanrestuadv@gmail.com

**BINTARO ADV**
Alamat : Jl.Pondok Betung Raya RT.02/05 No.38 Gg.Loyo (Dkt Bintaro Sek.4) Pondok Betung, TangseL Ph: 021-734.0343 / 7388.3865 HpWA: 0813.1493.5262 (WA) / 0857.1728.9851 Email: dee.lisa's@gmail.com

**MARDHIAH ADVERTISING**
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda no 34 pisangan ciputat tangsel 15419 Ph: 02174709469 HpWA: 081294944923 Email: mardhiah.adv12@gmail.com

**IKLANHEMAT.COM**
Alamat : Ruko Mutiara Modern Karawaci Blok C No.19 Karawaci - Tangerang 15810 PhiFax: - HpWA: 0811833755 Email: regina_iklan@yahoo.com / regina.iklan@gmail.com

**ABADI SEJAHTERA ADV**
Alamat : Perum.Pondok Cabe Blok C No.12 Pondok Cabe - Ciputat. PhiFax: - Hp: 08161126233 - 081281156562 / WA: 081281156562. Email: nilaamisni@ymail.com

**MEDIA IKLAN**
Alamat : Jl. Gas Alam No.25, Curug, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 16452. HpWa : 087837420404 / 081210333086 Email : mediaiklann@gmail.com

**CV.RINDANG SEJAHTERA MANDIRI**
Alamat : JL.BATANGHARI VI, RT.9, RW 05 No.323 Kel. Bakitjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok. Ph: 0822- 1111-9671 Email: ramsormin@yahoo.com

**WAY KOMUNIKASI**
Alamat : Jl. H Kisan No 83, Kunciran indah Pinang, Tangerang Kota. Ph: 021- 7337301 / 021- 7302521 HpWA: 081519621977 / 081314597199 Email: winur.mk1@gmail.com

**PT.RIZQI SHAFA PRADANA**
Alamat: Vila Mahkota Pasona Blok E3 no.10 Bojongkulur, Gng.Putri, Cibinong - Ph: 021-82402830, 081586717495, 08571439456? — HpWA: 081311146846, 081314019598, 087881387834 Email:iklan_rizshana@hotmail.com; rizshana@gmail.com; rizshana@hotmail.com;

**BI RAMA ADV**
Alamat : Kp Cilangkap 5 Rt 1/4 No 182 Tapos-Depok Ph : 021-87918442 Hp: 081211892724 Email : -

**GRAFICA ADV**
Alamat : Jl.Guru Muhammad Raya No.34 Ujung Harapan Kel.Bahagia Kec.Babelan-Bekasi PhiHpWA: 0817-888-729 Email: biroiklan_koran@yahoo.co.id

**PT.ANGELITA TRANS NUSANTARA**
Alamat: JLH.Adam Malik Kav.85-72,Kreo Selatan,Larangan,Kota Tangerang-Banten 15156 Tlp / HP: 081318782244 / 087880492244

**1122 Ad**
Modern Town Market Blok K2B No 23 Jl Hartono Raya Modern-Tangerang Telp (021) 559675595 / 081398782222 Email: 1122ad.initi@gmail.com

**TJUTJU AGENCY BOGOR**
Jl.Annasar No.84B RT.02/03 Kel.Cilendek Timur Kec.Bogor Barat Hp.085891513844.

### INFO IKLAN BARIS POSKOTA

PENERIMAAN IKLAN BUKA PUKUL 10.00 WIB

SENIN s/d JUMAT
Iklan Tutup pukul 18.00 WIB

SABTU
Iklan Tutup pukul 17.00 WIB

MINGGU
Iklan Tutup pukul 16.00 WIB

*Transaksi iklan setelah pukul diatas akan diproses keesokan harinya.

**Nyok dipasang iklan mini khusus POSKOTA**
**- Bergambar**
**- Berkotak**
**Hanya 100rb max 125 karakter**

TOYOTA



**TOYOTA KIJANG** Grand, Short- KF40-1995 Kon bgs,plat F-STNK 2029,Pjk Des 25(bs dprpjng), Jual Sgr Serpong Utara

Kehilangan

**TELAH HILANG** SHM No 06205 Luas 145m² Letak Jl. Kanangan, Kp [illegible] T004/ 006 Ams [illegible] DESA YAH

**PENJUALAN BAWAH** tangan Eksekusi Jaminan Fidusia : Daihatsu Ayla 2025 Daihatsu Ayla 2026 Daihatsu Sigra 2023

**BRDSRKN AKTA** Pembu baran No. 9,tgl 01-09-2026 yg dibuat oleh JIHAN KHOIRINI. SH. MKn Notaris Kab. Bndg Barat. Bhw PT SIDOMANDIRI JAYA.




Mau Berlangganan Koran POSKOTA???
Hubungi : WA. 0811.8872.888 Telp: 021-22129129
atau Agen Koran Terdekat



Mau Pasang Iklan
Di koran POSKOTA... Hubungi :
0811 8872 888 Telp : 021-22129129



# Penjaga Toko Makanan di Depok Jadi Korban Hipnotis

**DEPOK (Poskota)** – Seorang penjaga toko makanan ringan Mk Snack di kawasan Meruyung, Kecamatan Limo, Depok, diduga menjadi korban aksi hipnotis. Seorang pria yang dicurigai sebagai warga negara asing (WNA) diduga membawa kabur sejumlah uang dari laci kasir setelah menjalankan modus penukaran uang.

Kejadian tersebut berlangsung Jumat (30/10) sekitar pukul 15.00 WIB. Aksi pria yang memiliki ciri wajah menyerupai orang Timur Tengah itu terekam kamera CCTV dan videonya beredar luas di media sosial.

Dalam rekaman tersebut, pelaku terlihat mendatangi toko dengan berpura-pura menjadi pembeli. Setelah beberapa saat, pria itu mengajak penjaga toko berinteraksi dan meminta menukarkan uang.

Penjaga toko kemudian memperlihatkan laci kasir untuk memastikan ada atau tidaknya uang pecahan. Namun, saat perhatian korban tertuju pada laci tersebut, pelaku diduga mengambil beberapa lembar uang pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu. Uang itu selanjutnya dimasukkan ke saku celananya.

Salah seorang pegawai Mk Snack membenarkan kejadian tersebut. Dia menuturkan, korban merasa tidak sadar ketika melayani permintaan pria tersebut. Bahkan, korban mengaku seperti berada di bawah pengaruh hipnotis.

"Korban yang saat menjaga sore kemarin pengakuannya merasa seperti terhipnotis, terpedaya mengikuti apa yang disuruh pelaku. Mau saja, tidak sadar," kata pegawai Mk Snack kepada Poskota melalui pesan WhatsApp, Rabu (4/11). Dia meminta namanya tidak dipublikasikan.

Menurutnya, pria yang diduga WNA itu menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi dengan korban. Tidak ada bahasa asing yang digunakan pelaku selama berada di dalam toko.

"Menggunakan bahasa nasional kita. Tidak mempergunakan bahasa asing," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kejadian tersebut merupakan pengalaman pertama bagi pihak toko. Meski begitu, pihaknya khawatir pelaku kembali beraksi apabila belum berhasil diidentifikasi.

"Pelaku seperti ini jika belum terungkap akan ditakutkan melakukan kejahatan berulang lagi. Kasus ini belum dibuat laporan ke Polsek Cinere," tuturnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Hendra menyatakan, hingga Rabu (4/11), Polsek Cinere belum menerima laporan terkait dugaan aksi hipnotis yang melibatkan seorang WNA di wilayah Limo.

"Belum ada laporan melibatkan pelaku WNA yang melakukan hipnotis korbannya di wilayah Limo," tandasnya. **(ang)**



Poskota/Nejari Depok

PELANTIKAN - Kasi Intelijen Kejari Depok yang baru, Guntur Gani Prakoso, menjalani pengambilan sumpah jabatan dalam prosesi pelantikan dan sertijab di Aula Kejari Depok.

## Guntur Gani Prakoso Resmi Jabat Kasi Intelijen Kejari Depok

**DEPOK (Poskota)** – Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok menggelar serah terima jabatan (sertijab) Kepala Seksi (Kasi) Intelijen sekaligus pengambilan sumpah jabatan di Aula Kejari Depok, Selasa (3/11).

Dalam prosesi tersebut, Guntur Gani Prakoso resmi menjabat sebagai Kasi Intelijen Kejari Depok menggantikan Barkah Dwi Hatmoko. Sebelumnya, Guntur bertugas sebagai Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Majalengka.

Sertijab dipimpin langsung Kepala Kejari Depok Arief Budiman. Prosesi diawali dengan pembacaan Keputusan Jaksa Agung RI, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan, serta penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

Sementara itu, Barkah Dwi Hatmoko mendapat penugasan baru sebagai Kepala Seksi Perpustakaan dan Persuratan pada Kejaksaan Agung RI.

Kegiatan yang diikuti jajaran pegawai Kejari Depok tersebut berlangsung khidmat dan tertib. Setelah prosesi pelantikan, acara dilanjutkan dengan lepas sambut serta ramah tamah.

Kepala Kejari Depok Arief Budiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Barkah Dwi Hatmoko atas pengabdian serta dedikasinya selama kurang lebih 10 bulan bertugas di Kejari Depok.

"Terima kasih atas dedikasi Bapak Barkah Dwi Hatmoko selama mengabdi sebagai Kasi Intelijen di Kejari Depok," ujar Arief kepada wartawan.

Arief juga menyampaikan selamat bertugas kepada Guntur Gani Prakoso. Dia berharap pejabat baru tersebut dapat melanjutkan dan meningkatkan berbagai program kerja Bidang Intelijen di wilayah Kota Depok.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan ramah tamah dan suasana keakraban antara jajaran pegawai Kejari Depok dengan Barkah Dwi Hatmoko sebagai bentuk penghormatan atas pengabdiannya selama bertugas. **(ang)**

## 43 Pejabat BLUD RSUD Kota Bogor Dikukuhkan

**BOGOR (Poskota)** - Pemerintah Kota Bogor mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Kota Bogor melalui penguatan sumber daya manusia (SDM), kedisiplinan, serta pemanfaatan teknologi digital.

Sebanyak 43 pejabat nonstruktural Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Bogor dilantik dan dikukuhkan untuk memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengambilan sumpah dan pengukuhan dipimpin Direktur Utama RSUD Kota Bogor, Sri Nowo Retno, disaksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, di Aula Tanah Sareal, RSUD Kota Bogor, Rabu (4/11).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Hanafi, serta Kepala BKPSDM Kota Bogor, Dani Rahadian.

Dalam arahannya, Denny mengatakan 43 pejabat yang dikukuhkan merupakan SDM pilihan yang memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Ia meminta seluruh pejabat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran. Menurutnya, pelayanan kepada pasien harus diberikan secara adil tanpa membedakan latar belakang.

"Harapan organisasi yaitu RSUD Kota Bogor bisa meningkatkan pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Bapak ibu harus melek dan banyak memiliki kesabaran, karena dalam memberikan pelayanan kita tidak membeda-bedakan," ujar Denny.



Poskota/Diskominfo

Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi Tanda Tangani Pakta Integritas Anti KKN di Lingkup Pemkot Bogor.

Denny menegaskan, kualitas pelayanan rumah sakit tidak terlepas dari kedisiplinan, pemahaman terhadap tugas, serta konsistensi seluruh jajaran dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP).

Karena itu, para pejabat, terutama yang bertanggung jawab sebagai kepala ruangan, diminta memahami dan menerapkan SOP secara optimal.

Ia juga meminta setiap kendala maupun kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan segera dilaporkan kepada manajemen. Dengan begitu, evaluasi dan perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga persoalan di lapangan tidak berlarut-larut dan mengganggu pelayanan pasien.

Selain kedisiplinan dan penerapan standar pelayanan, Denny menyoroti peningnya transformasi digital di lingkungan RSUD Kota Bogor. Pemanfaatan teknologi dinilai perlu menjadi bagian dari pola kerja agar pelayanan kesehatan berlangsung lebih cepat, efektif, dan praktis.

Menurutnya, fasilitas digital yang telah tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang pekerjaan tenaga kesehatan maupun jajaran manajemen.

"Bapak ibu yang dikukuhkan harus memberikan masukan, bagaimana sarana kerja itu sudah ada di genggaman tangan bapak ibu, bukan lagi cari pulpen. Bisa melihat status pasien melalui genggaman tangan, memanfaatkan teknologi yang terus disempurnakan dan memudahkan bapak ibu," tegasnya.

Pengukuhan 43 pejabat tersebut diharapkan menjadi momentum pembenahan internal RSUD Kota Bogor. Penguatan kompetensi SDM, penerapan SOP secara konsisten, dan optimalisasi teknologi digital menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. **(den)**

## Kebakaran Hanguskan Dua Rumah dan Motor di Jasinga

**BOGOR (Poskota)** – Kebakaran melanda pemukiman warga di Desa Pangaur, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Rabu (4/11) pagi. Peristiwa tersebut mengakibatkan dua unit rumah dan tiga sepeda motor hangus terbakar.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, Yudi Santosa mengatakan, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik pada salah satu sepeda motor yang sedang diperbaiki di dalam rumah.

"Objek terbakar dua unit rumah dan tiga unit sepeda motor. Sumber api atau penyebab kebakaran karena korsleting listrik dari sepeda motor," kata Yudi, Rabu (4/11).

Menurutnya, peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 09.00 WIB. Api pertama kali muncul ketika seorang warga sedang memperbaiki sepeda motor di dalam rumah.

Tanpa diduga, tiba-tiba muncul percikan api dari bagian kelistrikan kendaraan tersebut. Percikan itu kemudian memicu kebakaran yang dengan cepat membesar dan melahap bagian rumah.

"Tiba-tiba timbul percikan api atau korsleting listrik dari sepeda motor tersebut dan timbullah api yang cepat membesar," jelasnya.

Warga sempat berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Namun, kobaran api semakin membesar hingga merambat ke dua rumah di sekitarnya.

Melihat kondisi tersebut, kepala dusun kemudian menghubungi petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Sektor Leuwiliang untuk meminta bantuan pemadaman.

Yudi memastikan tidak ada korban jiwa maupun laporan korban dalam peristiwa tersebut. Setelah petugas berjibaku melakukan pemadaman, api akhirnya berhasil dikendalikan sekitar satu jam kemudian.

"Situasi akhir api berhasil dipadamkan, proses pemadaman berjalan dengan lancar," pungkasnya. **(den)**

## Kapolres Depok Jenguk Mahasiswi UI Korban Jambret

**DEPOK (Poskota)** – Bentuk kepedulian terhadap korban kejahatan jalanan ditunjukkan Kapolres Metro Depok Kombes Pol Christian Rony Putra. Bersama sejumlah pejabat utama (PJU) dan Kapolsek Beji Kompol Antonius, dia mengunjungi Siti Fatimah Azzahra, mahasiswi Universitas Indonesia (UI) yang menjadi korban penjambretan.

Kunjungan tersebut berlangsung di tempat kos korban di Jalan Juragan Sinda Raya, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Rabu (4/11).

Dalam kesempatan itu, Kapolres didampingi Kapolsek Beji Kompol Antonius, Kasat Binmas Kompol Nur Ahmadi, serta Kasat Intelkam Kompol Sutarno. Kedatangan rombongan kepolisian tersebut untuk memberikan dukungan moril sekaligus memastikan kondisi korban setelah mengalami peristiwa penjambretan.

Kapolres Metro Depok Kombes Pol Christian Rony Putra mengatakan, Siti Fatimah yang merupakan mahasiswi semester 7 UI sebelumnya menjadi korban penjambretan. Namun, pelaku dalam kasus tersebut telah berhasil ditangkap.

"Beberapa waktu lalu Siti Fatimah, mahasiswi semester 7 Universitas Indonesia, menjadi korban jambret. Alhamdulillah pelaku sudah berhasil kami tangkap. Kehadiran Bapak Kapolres beserta PJU sebagai bentuk kepedulian menjenguk korban dan memberikan motivasi sebagai penyemangat," ujar Christian kepada Poskota, Rabu (4/11).

Menurutnya, kunjungan tersebut tidak hanya untuk melihat kondisi korban, tetapi juga memberikan perhatian dan dukungan selama proses pemulihan pascakejadian.

Selain itu, kehadiran jajaran kepolisian diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian.

"Kunjungan tersebut juga bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat, memastikan penanganan perkara berjalan sesuai prosedur, serta memberikan imbauan agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi tindak kejahatan jalanan," ungkapnya.

Christian berharap, melalui kegiatan tersebut, Polri semakin menunjukkan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.

Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu melaporkan tindak kriminalitas maupun gangguan keamanan melalui layanan Call Center 110.

"Polisi bersama masyarakat jika ada kejadian dapat melapor ke Call Center 110 untuk mendapatkan quick response anggota ke lokasi," tutupnya. **(ang)**



Poskota/Polsek Beji

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Christian Rony Putra didampingi Kapolsek Beji Kompol Antonius beserta PJU mengunjungi korban jambret mahasiswa UI di kostannya.

## Jalan Laladon Ciomas Bakal Diperlebar pada 2027

**BOGOR (Poskota)** – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyiapkan pelebaran jalan di kawasan Laladon, Kecamatan Ciomas, sepanjang sekitar satu kilometer. Proyek yang direncanakan mulai dikerjakan pada 2027 ini akan memanfaatkan sejumlah lahan milik pemerintah daerah untuk menguranggi kebutuhan pembebasan tanah.

Persiapan proyek tersebut mulai dilakukan dengan meninjau langsung lokasi. Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama jajaran terkait mengecek ruas jalan dari kawasan Terminal Laladon, Rabu (4/11).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan lahan serta mendata aset pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk mendukung pelebaran jalan.

Rudy menjelaskan, dari hasil pengecekan ditemukan beberapa bidang tanah di sepanjang ruas jalan yang merupakan aset Pemkab Bogor. Kondisi tersebut dinilai dapat membantu pelaksanaan pembangunan tanpa harus melakukan pembebasan seluruh lahan.

"Jadi, kunjungan kami hari ini juga dalam rangka meninjau rencana pelebaran jalan yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Panjangnya kurang lebih satu kilometer, mulai dari Terminal Laladon. Dari hasil peninjauan, ternyata ada beberapa lahan yang tidak perlu dibebaskan karena merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Bogor," kata Rudy.



Poskota/Diskominfo

Sejumlah kendaraan memadati Jalan Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/11/2026).

Dia menyebutkan, aset pemerintah yang berada di kawasan tersebut antara lain area pasar, Terminal Laladon, Instalasi Karantina Ikan, serta UPT 4 Dinas Perikanan dan Peternakan.

Menurut Rudy, aset-aset tersebut perlu dioptimalkan agar dapat memberikan manfaat langsung bagi pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

"Optimalisasi aset daerah perlu dilakukan agar pemanfaatannya dapat mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Untuk mendukung rencana tersebut, Pemkab Bogor akan menata administrasi pengelolaan aset. Salah satunya melalui pengalihan pengelolaan lahan yang sebelumnya tercatat sebagai aset Dinas Perikanan dan Peternakan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

Langkah tersebut dilakukan agar pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah untuk proyek pelebaran jalan memiliki kejelasan administrasi dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemkab Bogor berharap pelebaran jalan sepanjang satu kilometer tersebut dapat meningkatkan kelancaran arus kendaraan serta mempermudah mobilitas masyarakat di kawasan Laladon dan sekitarnya. **(den)**

# DPR Minta Prabowo Evaluasi Bintang Mahaputera Listyo Sigit

**JAKARTA (Poskota)** - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendorong Presiden Prabowo Subianto melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan untuk mengkaji kemungkinan pencabutan Bintang Mahaputera Adipurna yang diberikan kepada Listyo Sigit Prabowo.

Menurut TB Hasanuddin, tanda kehormatan negara bukan sekadar penghargaan, melainkan juga simbol integritas moral, keteladanan, dan komitmen terhadap bangsa dan negara. Karena itu, perkembangan hukum yang melibatkan penerimanya perlu menjadi perhatian sekaligus bahan evaluasi pemerintah.

Listyo Sigit menerima Bintang Mahaputera Adipurna dari Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026. Namun, pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Salah satu tersangka berinisial LSP yang disebut sebagai Listyo Sigit Prabowo.

"Penghargaan negara seperti Bintang Mahaputera bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi juga melekat tanggung jawab moral dan keteladanan. Karena itu, perkembangan perkara ini perlu menjadi perhatian Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan," ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (4/11).

Dia menegaskan, dorongan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap pihak yang masih menjalani proses hukum. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati, sementara penegakan hukum berjalan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

TB Hasanuddin menjelaskan, mekanisme pencabutan tanda kehormatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Dalam Pasal 35, Presiden memiliki kewenangan mencabut tanda kehormatan apabila penerimanya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Persyaratan tersebut antara lain memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa bagi bangsa dan negara, berkelakuan baik, serta setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara.



Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ketentuan tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2009.

Pasal 79 ayat (1) menyebutkan bahwa Presiden berhak mencabut tanda jasa dan/atau tanda kehormatan apabila penerimanya tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencabutan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3).

Sementara itu, Pasal 80 PP Nomor 35 Tahun 2010 mengatur bahwa usulan pencabutan dapat diajukan oleh perseorangan, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, organisasi, maupun kelompok masyarakat kepada Presiden melalui Dewan. Usulan tersebut harus disertai alasan dan bukti pendukung.

Selanjutnya, Dewan akan meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan tersebut dengan mempertimbangkan keterangan dari penerima tanda kehormatan serta meminta masukan dari kementerian atau lembaga terkait.

"Dengan adanya ketentuan tersebut, Dewan Gelar memiliki landasan untuk menelaah persoalan ini sesuai mekanisme yang berlaku. Saya mendorong agar kajian dilakukan secara objektif dan komprehensif, sehingga pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam mengambil keputusan," jelasnya.

TB Hasanuddin berharap pemerintah konsisten menjaga kehormatan tanda jasa dan tanda kehormatan negara agar tetap memiliki nilai, wibawa, serta kepercayaan publik. **(tog)**



PoskotaIAli Mansur

Sidang perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa mantan Jampidsus Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu, 4 November 2026.

# Kuasa Hukum Pertanyakan Dakwaan Pemerasan

## ❍ Empat Saksi Tak Kenal Febrie Adriansyah

**KEMAYORAN (Poskota)** - Kuasa hukum Febrie Adriansyah, Patra M Zen, menilai keterangan empat saksi yang dihadirkan dalam persidangan belum menunjukkan adanya unsur pemerasan dalam jabatan sebagaimana didakwakan kepada kliennya.

Menurut Patra, keempat saksi mengaku tidak mengenal Febrie dan tidak pernah mengalami pemaksaan untuk menyerahkan uang.

"Persidangan hari ini sebenarnya muncul pertanyaan, ini persidangan dakwaan Pak Febrie Adriansyah atau dakwaan Ferry Hongkiriwang? Kenapa ini menjadi pertanyaan, karena keempat-empatnya di dalam persidangan saksi menerangkan tidak pernah kenal, tidak pernah tahu, tidak pernah ada satu keterangan yang bisa dikaitkan dengan terdakwa Febrie Adriansyah," ujar Patra seusai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kemayoran, Rabu (4/11).

Patra mengatakan, pemeriksaan terhadap empat saksi justru memunculkan pertanyaan mengenai relevansi keterangan mereka dengan dakwaan yang ditujukan kepada kliennya.

Adapun empat saksi yang diperiksa dalam persidangan tersebut yakni HC dari PT PA, AS dari PT SAM, FX Wilbayu dari PT WB, serta WF yang merupakan staf legal PT JM.

Dia menjelaskan, salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam perkara tersebut adalah dugaan pemerasan dalam jabatan. Karena itu, menurut Patra, perlu dibuktikan apakah Febrie pernah melakukan pemaksaan, intimidasi, atau meneror pihak tertentu agar menyerahkan uang.

Namun, berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Patra menilai tidak ada pengakuan mengenai adanya tekanan maupun paksaan tersebut. Dia juga menyebut pembayaran yang dilakukan perusahaan terkait jasa hukum diberikan secara sukarela.

"Empat orang ini ditanya bolak-balik, enggak pernah ketemu, enggak pernah merasa ada orang lain menyampaikan pesan bahwa dipaksa, bahkan seluruh uang yang diberikan dalam kaitannya dengan jasa hukum itu sukarela," jelas Patra.

Atas dasar keterangan tersebut, Patra mempertanyakan terpenuhinya unsur pemerasan dalam jabatan yang menjadi bagian dari dakwaan terhadap Febrie.

Dia menilai fakta-fakta yang terungkap dari keterangan para saksi perlu menjadi perhatian dalam pembuktian perkara, termasuk ketika jaksa menguraikan hubungan antara pembayaran jasa hukum dan dugaan tindak pidana yang didakwakan.

"Kalau pemerasan dalam jabatan, dakwaan pertama ini tidak bisa dibuktikan, rumuh. Enggak ada itu TPPU," tegas Patra.

Meski menyampaikan keberatan terhadap dakwaan tersebut, Patra berharap seluruh rangkaian persidangan tetap berjalan secara objektif dan sesuai ketentuan hukum. Dia juga meminta majelis hakim menggali seluruh fakta yang terungkap di persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dalam perkara yang menjerat kliennya. **(man)**

# Jokowi Berpotensi Diperiksa dalam Kasus Dugaan Penyadapan

**JAKARTA (Poskota)** - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, siapa pun yang didukung fakta dan alat bukti cukup dapat diperiksa dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Pemeriksaan tersebut tidak menutup kemungkinan menyasar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan, Listyo Sigit Prabowo.

"Pada intinya sih siapa pun yang cukup kuat fakta-fakta dan alat-alat buktinya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan tentu akan dilakukan terhadap siapa pun," kata Yusril kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu (4/11).

Saat kembali ditanya apakah pemeriksaan juga dapat mencakup mantan presiden, Yusril membenarkannya. Namun, dia meminta semua pihak tidak berspekulasi mengenai siapa saja yang terlibat sebelum penyidik mengungkap fakta-fakta dalam perkara tersebut.

"Ya, termasuk siapa pun. Berarti siapa pun, ya. Ya tidak terbatas pada orang-orang tertentu, tapi kita tidak bisa apriori mengatakan menyangka itu, menyangka ini," ujarnya.

Yusril mengatakan, proses pengungkapan perkara sepenuhnya diserahkan kepada penyidik. Pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan akan dimintai keterangan terlebih dahulu sebelum penyidik menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Lebih baik kita serahkan lakukan penyelidikan dan penelitian dan penyidikan untuk mengungkap fakta-fakta dan siapa saja yang terlibat ya tentu akan dimintai keterangan terlebih dahulu sampai ada kesimpulan dari para penyidik apakah kasus itu hanya sampai berhenti pada tingkat penyelidikan saja pada orang tertentu, apakah perlu ditingkatkan pada tingkat penyidikan," tuturnya.

Dia menegaskan, pemerintah berkomitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Menurut Yusril, arahan Presiden Prabowo Subianto agar kasus tersebut ditangani secara tegas telah ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri.

"Ya, arahan beliau memang supaya kasus ini penegakan hukum itu dilakukan dengan tegas dan tanpa pandang bulu. Dan telah dilakukan oleh para penyidik Bareskrim Mabes Polri," katanya.

Yusril juga menyebut jumlah orang yang diperiksa dalam perkara tersebut terus bertambah. Meski demikian, hingga saat ini belum ada penetapan tersangka baru.

"Orang yang diperiksa bertambah, tapi belum ditetapkan statusnya. Jadi belum ada tersangka baru, tapi penyelidikan terus dilanjutkan dan saya kira mungkin hari-hari mendatang akan ada penetapan tersangka baru jika memang ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup seperti diatur dalam KUHAP," ujarnya.

Dia menambahkan, saksi yang telah diperiksa sejauh ini berasal dari internal Polri. Namun, pemeriksaan tidak menutup kemungkinan berkembang ke pihak di luar institusi kepolisian.

"Sementara ini dari internal Polri. Tapi bisa saja dalam pengembangan juga menemukan orang lain yang terlibat di luar institusi kepolisian," katanya. **(tog)**

# Prabowo Tunjuk Letjen Ariyo Windutomo Jadi Plt Kepala Staf Kepresidenan

**JAKARTA (Poskota)** - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Penunjukan tersebut dilakukan setelah Prabowo memberhentikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan KSP menyusul penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal oleh Bareskrim Polri.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keputusan pemberhentian Listyo Sigit ditandatangani Presiden Prabowo pada Rabu (4/11).

"Pagi hari tadi bapak presiden telah mengambil keputusan dan menandatangani keputusan presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan," jelas Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Prasetyo mengatakan, penunjukan Plt KSP dilakukan untuk menghindari kekosongan jabatan yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan.

"Selanjutnya bapak presiden memunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan tersebut. Untuk sementara beliau menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo," ujarnya.

Sebagai informasi, Letjen TNI Ariyo Windutomo saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang diduga menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

Ketiga tersangka tersebut yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Sementara itu, satu orang lainnya berinisial SU masih menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan, para tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri. "Terhadap tersangka kita tahan di Rutan Mabes Polri," ujarnya dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11).

ingga kini, penyidik masih mendalami motif di balik dugaan penyadapan tersebut. **(tog)**

# Soroti Reformasi Polri, Pengamat: Polisi Jangan Berubah Jadi Pengintai

**KEBAYORAN BARU (Poskota)** - Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi sorotan pengamat kepolisian. Kasus tersebut dinilai bukan sekadar persoalan pidana, tetapi juga menjadi ujian serius bagi reformasi Polri dan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat penegak hukum.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security & Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan untuk mengawasi pihak di luar kepentingan penegakan hukum berpotensi mencederai prinsip negara hukum. Menurutnya, kewenangan kepolisian untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum tidak boleh disalahgunakan sebagai alat pengawasan untuk kepentingan di luar hukum.

"Apabila dugaan penyadapan tanpa dasar hukum tersebut terbukti, persoalannya bukan hanya pelanggaran prosedur operasional. Ini merupakan penyimpangan fundamental terhadap etika kelembagaan, etika kenegaraan, dan etika kepribadian Polri," ujar Bambang dalam keterangannya, Rabu (4/11).

Diketahui, Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, dan penghapusan data elektronik. Salah satu pihak yang disebut ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri lainnya.

Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik menduga adanya penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk menyadap sejumlah nomor telepon tanpa melalui prosedur verifikasi dan tanpa berkaitan dengan penyelidikan maupun penyidikan yang sah.

Sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Bambang mengingatkan bahwa penetapan tersangka bukan merupakan bukti seorang bersalah. Karena itu, proses hukum harus berjalan secara transparan dan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah.

Dia juga meminta penyidik menelisisi seluruh rantai komando, mulai dari pemberi perintah, pemberi persetujuan, pengendali akses, hingga pihak yang memanfaatkan hasil penyadapan.

"Jangan sampai pelaksana teknis menjadi pihak yang menanggung seluruh kesalahan, sementara pengendali kewenangan justru terlindungi," tegas Bambang.

Bambang menjelaskan, dugaan penyadapan ilegal tersebut dapat dikaji melalui ketentuan Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP Nasional serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan tersebut berkaitan dengan intersepsi ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta perusakan atau penghilangan informasi elektronik.

Selain itu, dugaan penghapusan data dan jejak aktivitas sistem LIMS juga perlu ditelusuri melalui pemeriksaan forensik digital. Menurut Bambang, seluruh aktivitas akses, identitas akun, waktu penggunaan, perintah, hingga perubahan data harus direkonstruksi. Langkah tersebut diperlukan agar proses pembuktian tidak hanya bergantung pada keterangan pihak-pihak yang berada dalam satu rantai komando.

Bambang juga menegaskan bahwa penyadapan pada dasarnya dapat menjadi instrumen penegakan hukum apabila dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang sah. Namun, penggunaan teknologi tersebut harus memiliki tujuan yang jelas, pembatasan sasaran, serta mekanisme pengawasan.

Lebih jauh, Bambang menilai praktik penyadapan tanpa dasar hukum berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan kehidupan demokrasi. Masyarakat, jurnalis, maupun aktivis dapat merasa terintimidasi ketika muncul anggapan bahwa komunikasi pribadi mereka sewaktu-waktu bisa diawasi aparat.

"Jika penyadapan tanpa dasar hukum benar dilakukan terhadap pejabat negara, jurnalis, aktivis, dan masyarakat sipil, dampaknya melampaui pelanggaran privasi. Ia dapat menciptakan chilling effect terhadap kebebasan berekspresi dan partisipasi demokratis," jelas Bambang.

Karena itu, Bambang mendorong pemerintah dan DPR segera membahas regulasi khusus mengenai penyadapan. Aturan tersebut dinilai penting untuk menyatukan berbagai ketentuan sektoral sekaligus memperjelas batas kewenangan lembaga yang memiliki akses terhadap teknologi intersepsi.

"Regulasi penyadapan idealnya mengatur otorisasi independen, pembatasan target dan durasi penyadapan, audit teknologi, pencatatan aktivitas yang tidak dapat dimanipulasi, hingga mekanisme pengaduan dan pemulihan hak bagi korban," beber Bambang.

Bambang menilai pengawasan penyadapan harus melibatkan pihak eksternal, termasuk lembaga yudisial, untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Menurutnya, reformasi Polri tidak cukup dilakukan melalui pergantian pimpinan atau perubahan struktur, tetapi harus menyentuh tata kelola kekuasaan dan pertanggungjawaban hingga tingkat tertinggi.

"Persoalan sesungguhnya adalah apakah negara membiarkan aparat memiliki kewenangan untuk mengawasi warga tanpa kontrol hukum yang memadai," ucap Bambang. **(man)**

# Helikopter Mi-17 Jatuh Saat Padamkan Karhutla di Kalteng

## ❍ Dua Personel Hilang

**KEBAYORAN BARU (Poskota)** - Helikopter Mi-17 milik Penerbangan TNI Angkatan Darat (Penerbad) mengalami kecelakaan saat menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di perairan Pematang Limau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11). Sebanyak delapan personel berada di dalam helikopter saat insiden terjadi.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Muhammad Nas mengatakan, enam personel berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara itu, dua personel lainnya masih belum ditemukan dan sedang dalam proses pencarian.

"Informasi awal seperti itu, sedang dilaksanakan penanganan," tutur Muhammad Nas saat dikonfirmasi, Rabu (4/11).

Muhammad Nas menjelaskan, terdapat delapan orang di dalam helikopter ketika kecelakaan terjadi. Dia meminta masyarakat memunggu perkembangan informasi resmi terkait kondisi seluruh personel.

"Crew on board 8 orang, (untuk korban) agar menunggu (informasi selanjutnya), sedang dilaksanakan penanganan," ucap Muhammad Nas.

Berdasarkan laporan awal, helikopter jenis Mi-17 dengan nomor registrasi HA-5235 tersebut jatuh di perairan Pematang Limau. Lokasi kecelakaan diperkirakan berjarak sekitar satu kilometer dari bibir pantai.

Helikopter itu diketahui berpangkalan di Bandara Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Saat kecelakaan terjadi, armada tersebut tengah menjalankan tugas mendukung operasi penanggulangan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah.

Proses evakuasi terhadap enam personel yang selamat dilakukan secara bertahap. Dua personel dievakuasi menggunakan helikopter Bell Penerbad HA-5172 untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit melalui Bandara Kuala Pembuang.

Sementara itu, empat personel lainnya telah dibawa ke Pos Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) di kawasan Pematang Limau. Adapun pencarian terhadap dua personel yang belum ditemukan masih terus dilakukan.

Dalam laporan awal, Mayor CPN Dudi tercatat sebagai pilot in command (PIC), sedangkan Kapten CPN Hafiz bertugas sebagai kopilot. Hingga kini, proses penanganan kecelakaan dan pencarian terhadap dua personel tersebut masih berlangsung. **(man)**

# BUMDesa Kembangkan Ekosistem Biomassa

❍ Dorong Desa Jadi Pemasok Energi Nasional

**JAKARTA (Poskota)** - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat pengembangan ekosistem biomassa berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Langkah ini dilakukan untuk mendorong desa menjadi bagian dari rantai pasok energi nasional.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto mengatakan, pengembangan ekosistem biomassa merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi sumber daya desa menjadi komoditas bernilai ekonomi.

Melalui kolaborasi dengan PLN EPI, masyarakat desa didorong mengambil peran aktif sebagai pelaku usaha dalam rantai pasok energi nasional.

Salah satu implementasi program tersebut dilakukan melalui Pengembangan Ekosistem Biomassa Bersama BUMDesa di Desa Salira, Kabupaten Serang, Banten. Program ini ditandai dengan pengiriman perdana serbuk gergaji (sawdust) dari BUM-Desa Desa Salira menuju PLTU Suralaya yang dioperasikan PLN Indonesia Power.

Kolaborasi tersebut mengintegrasikan potensi limbah pertanian, perkebunan, dan industri lokal ke dalam rantai pasok biomassa untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik. Upaya ini sekaligus mendukung transisi energi, mengurangi emisi karbon, serta menciptakan peluang ekonomi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat desa.

"Benar-benar menjadi tonggak keseriusan kita. Ujungnya adalah bagaimana memastikan potensi apa pun yang ada di desa bisa kita maksimalkan," ujar Yandri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/11).

Yandri menilai pengembangan ekosistem biomassa memiliki potensi besar untuk direplikasi di berbagai wilayah Indonesia. Di Kabupaten Serang, terdapat 326 desa yang dapat dipetakan potensi sumber daya lokalnya untuk mendukung rantai pasok biomassa.

"Kalau ada kepastian penyerapan, akan ada kegiatan ekonomi. Ada yang bekerja, ada yang mendapatkan uang, ada juga kebersihan lingkungan. Efek dominonya banyak. Bukan hanya sekadar uang rupiah, tetapi bagaimana keberlangsungan hidup di desa menjadi lebih bersih, lebih guyub dan lebih bagus," ujar Yandri.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto menjelaskan, pengembangan biomassa merupakan bagian dari strategi diversifikasi energi primer PLN Group. Langkah ini bertujuan mendukung keandalan pasokan listrik sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar PLTU.

Pemanfaatan biomassa melalui teknologi cofiring memungkinkan sebagian penggunaan batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) disubstitusi dengan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.

Selain berkontribusi terhadap pengurangan emisi, program ini membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyediaan energi primer melalui pengembangan ekonomi sirkular.

"Kalau batubara dan gas rata-rata berasal dari pemasok besar, biomassa ini merupakan pasokan yang melibatkan ekonomi sirkuler. Menurut kami, ini juga bagian dari ekonomi kerakyatan," ujar Rakhmad.

Dalam jangka panjang, PLN EPI menargetkan pemanfaatan biomassa untuk program cofiring mencapai delapan juta hingga 10 juta ton di 51 titik pembangkit di seluruh Indonesia.

Untuk mendukung target tersebut, perusahaan terus memperluas kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk BUMDesa, guna membangun rantai pasok biomassa yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pengembangan ekosistem ini dilakukan melalui model rantai pasok yang melibatkan hub, subhub, serta pusat pengumpulan dan pengolahan biomassa. Dalam skema tersebut, BUMDesa berpeluang menjadi agregator bahan baku dari masyarakat maupun pengelola fasilitas produksi biomassa sesuai spesifikasi kebutuhan pembangkit.

"Kami berkolaborasi dengan mitra untuk membantu dari sisi fasilitas produksinya, apakah itu mesin pencacah atau mesin pengering. Tujuannya supaya kualitas biomassa ini ketika masuk ke PLTU menjadi lebih baik," kata Rakhmad. **(tog)**

## 25 Juta Warga RI Belum Punya Rekening Bank

**JAKARTA (Poskota)** - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendukung langkah pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan melalui program Satu Orang Satu Rekening. Dukungan tersebut dinilai penting mengingat masih terdapat sekitar 25 juta penduduk Indonesia berusia di atas 17 tahun yang belum memiliki rekening perbankan.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, dukungan terhadap program tersebut diwujudkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L), terutama dalam penyelarasan data serta penetapan kriteria calon penerima manfaat.

"LPS mendukung pelaksanaan program tersebut melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, khususnya dalam penyelarasan data dan kriteria calon peserta program," ujar Anggito dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (3/11).

Berdasarkan data LPS, jumlah penduduk berusia di atas 17 tahun yang belum memiliki rekening perbankan atau masuk kategori unbanked diperkirakan mencapai 25 juta jiwa. Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam merumuskan strategi pemerataan akses terhadap layanan keuangan formal.

"Jumlah penduduk yang belum memiliki rekening usia di atas 17 tahun adalah sekitar 25 juta," ungkapnya.

Anggito meyakini, koordinasi antarlembaga yang solid dapat mempercepat peningkatan kepemilikan rekening perbankan, sehingga akses layanan keuangan formal dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum terlayani.

"LPS mendukung program Pemerintah yang berencana meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki rekening," pungkas Anggito. **(tog)**

## Pemerintah Tegaskan Beasiswa LPDP Bukan Giveaway

❍ Minta Awardee Kembali Mengabdi ke RI

**JAKARTA (Poskota)** - Wakil Menteri Keuangan Nur Kholisoh mengingatkan bahwa dana beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dihimpun melalui pajak dan kontribusi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, para penerima beasiswa (awardee) diminta tidak memandang fasilitas tersebut semata-mata sebagai sarana untuk kepentingan pribadi.

Wamenkeu menegaskan, tidak semua masyarakat yang turut berkontribusi membayar pajak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi, terlebih hingga ke luar negeri.

"Beasiswa LPDP ini bukan hadiah, bukan giveaway. Ini adalah amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Orang yang diberi amanah itu wajarnya berterima kasih, salah satunya dengan menjadi patriot. Patriot adalah orang yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan," tegas Wamenkeu dalam kegiatan Persiapan Keberangkatan (PK) LPDP Angkatan 286 di Jakarta, Rabu (4/11).

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu berpesan kepada 214 penerima beasiswa LPDP Angkatan 286 agar tetap berpegang pada komitmen awal untuk kembali ke Tanah Air dan mengabdikan ilmu yang diperoleh demi kemajuan bangsa.

Pesan itu disampaikan dalam acara bertajuk Bara Jenggala: Tumbuh Bersama, Menyala untuk Indonesia.

Dia juga mengingatkan para awardee mengenai berbagai godaan dan pilihan selama menempuh pendidikan di luar negeri, mulai dari tawaran karier dengan penghasilan tinggi hingga kesempatan untuk menetap di negara tujuan.

Untuk menghadapi berbagai pilihan tersebut, Wamenkeu menitipkan tiga prinsip utama yang harus dipegang para penerima beasiswa, yakni niat, giat, dan manfaat.

Menurutnya, niat berarti mengukuhkan tekad untuk menuntut ilmu sekaligus kembali mengabdi kepada Indonesia. Sementara itu, giat bermakna menjaga semangat belajar dan kesungguhan dalam menempuh pendidikan, tanpa mengabaikan integritas akademik serta kejujuran, termasuk dalam memanfaatkan teknologi pendukung seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Adapun manfaat berarti menjadikan ilmu pengetahuan dan jaringan internasional yang diperoleh selama masa studi sebagai modal untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

Mengaitkan pesannya dengan momentum Hari Pahlawan pada 10 November, Wamenkeu menyebut perjuangan di era modern dapat diwujudkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan, integritas, serta kepedulian terhadap bangsa dan negara.

"Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi yang dibutuhkan adalah orang pintar yang berintegritas, punya kepedulian, dan patriot. Dulu pahlawan berjuang dengan senjata, Anda semua bisa menjadi pahlawan dengan ilmu pengetahuan," ujarnya.

Sebagai informasi, kegiatan PK LPDP Angkatan 286 diikuti 214 penerima beasiswa, yang terdiri atas 122 mahasiswa jenjang magister dan 92 mahasiswa jenjang doktoral.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 174 peserta akan melanjutkan pendidikan di 16 negara, sedangkan 40 peserta lainnya menempuh studi di perguruan tinggi dalam negeri.

Menutup arahannya, Wamenkeu mengajak para penerima beasiswa untuk senantiasa menjaga nama baik Indonesia serta memenuhi tanggung jawab dengan memberikan kontribusi kepada bangsa setelah menyelesaikan pendidikan.

"Kita pergi untuk kembali. Saya tunggu Anda pulang, saya tunggu kontribusi Anda. Selamat membawa Merah Putih," pungkas Wamenkeu. **(tog)**



Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti (dua dari kanan) saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (3/11).

## Jaga Stabilitas Rupiah, BI Siapkan Berbagai Instrumen

**JAKARTA (Poskota)** - Bank Indonesia (BI) menyiapkan sejumlah instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar global.

Bank sentral tidak hanya mengandalkan intervensi di pasar valuta asing, tetapi juga mengombinasikannya dengan kebijakan suku bunga, penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), hingga pemberian insentif lindung nilai (hedging).

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, pemilihan instrumen kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar serta sumber tekanan terhadap nilai tukar. Menurutnya, menjaga stabilitas rupiah membutuhkan ketepatan dalam menentukan instrumen yang digunakan.

"Kapan kita fokus pada satu tools yang saat ini ataupun instrumen yang satu, dan kapan kita fokus kepada langkah-langkah yang lain ataupun instrumen yang lain," kata Destry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa malam (3/11).

Destry menjelaskan, mandat BI tidak hanya menjaga stabilitas moneter, tetapi juga menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

Namun, stabilitas tetap menjadi prasyarat utama untuk mencapai tujuan tersebut. Sebab, iklim ekonomi yang kondusif sulit tercipta apabila nilai tukar dan kondisi pasar keuangan mengalami gejolak.

Dalam menjaga stabilitas rupiah, BI menggunakan nilai fundamental sebagai salah satu acuan dalam menentukan arah kebijakan. Meski demikian, pergerakan nilai tukar tidak selalu mencerminkan kondisi fundamental karena turut dipengaruhi sentimen pasar dan berbagai perkembangan eksternal.

Destry mengatakan, apabila pergerakan rupiah menyimpang dari nilai fundamental akibat munculnya sentimen secara tiba-tiba, BI dapat melakukan intervensi untuk menjaga agar nilai tukar tetap bergerak sesuai kondisi fundamentalnya.

Selain intervensi, BI juga memiliki sejumlah instrumen lain, mulai dari kebijakan suku bunga, penerbitan SRBI, hingga pemberian insentif biaya lindung nilai yang lebih terarah atau targeted hedging.

Kombinasi berbagai instrumen tersebut memberikan ruang bagi BI untuk menyesuaikan respons kebijakan berdasarkan karakteristik tekanan yang sedang dihadapi pasar.

"Jadi, kalau ditanya apakah BI akan terus menggunakan intervensi? Ya kita pasti juga akan tetap ada untuk menjaga stabilitas di pasar, baik itu melalui spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), atau Deliverable Forward (NDF). Dan sejauh ini kami masih melihat hasilnya cukup efektif," ujar Destry.

Strategi tersebut diterapkan di tengah tekanan pasar global yang masih memengaruhi pergerakan rupiah. Berdasarkan catatan BI, rupiah sempat menguat hingga pertengahan September 2026.

Namun, pada 2 November 2026, rupiah melemah 0,11% menjadi Rp18.145 per dolar AS dibandingkan posisi akhir Oktober 2026.

Destry menyebut pelemahan rupiah dipengaruhi sejumlah faktor eksternal, di antaranya eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), serta perubahan sentimen investor global terhadap aset negara berkembang.

Tekanan tersebut juga tercermin dari pergerakan investasi portofolio asing. Pada triwulan III 2026, investasi portofolio asing mencatatkan arus modal keluar bersih (net outflows) sebesar USD0,08 miliar, terutama akibat keluarnya dana dari pasar saham.

Meski demikian, aliran modal asing mulai menunjukkan perbaikan pada awal triwulan IV 2026. Hingga 23 Oktober 2026, investasi portofolio asing mencatatkan arus modal masuk bersih (net inflows) sebesar USD0,04 miliar.

Arus modal masuk tersebut terutama ditopang investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Secara kumulatif, investasi portofolio asing sejak Januari hingga 23 Oktober 2026 masih mencatatkan net inflows sebesar USD13,23 miliar.

Di tengah tekanan terhadap nilai tukar, posisi cadangan devisa Indonesia juga masih berada pada level yang relatif kuat. Destry menyebut cadangan devisa pada akhir September 2026 mencapai USD146,3 miliar.

Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi ini juga berada di atas standar kecukupan internasional yang umumnya setara dengan tiga bulan impor.

Cadangan devisa tersebut menjadi salah satu penopang ketahanan eksternal Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Meski demikian, Destry mengingatkan bahwa pergerakan rupiah ke depan masih akan dipengaruhi perkembangan ekonomi dan geopolitik internasional, termasuk arah kebijakan moneter AS serta perubahan persepsi investor terhadap aset di negara berkembang.

"Dengan demikian, kami akan terus mengombinasikan berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar, sekaligus memastikan kondisi moneter tetap mendukung aktivitas ekonomi domestik," paparnya. **(tog)**

## Wujudkan Zero ODOL 2027, Kemenhub Siapkan Penyidik Khusus

**JAKARTA (Poskota)** - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus memantangkan kesiapan aparat penegak hukum untuk merealisasikan target Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 2027. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kompetensi, penyamaan persepsi hukum, serta pembekalan teknis bagi para penyidik agar penindakan terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi ketentuan dimensi dan muatan dapat berjalan efektif.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menegaskan bahwa pelatihan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan fondasi strategis sebelum penegakan hukum secara penuh diterapkan di lapangan.

"Ini sangat penting karena sumber daya manusia atau penyidik ini nanti yang akan langsung berhadapan dengan permasalahan-permasalahan over dimensi, overload," kata Aan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Operasi P21 Over Dimension Over Loading Menuju Zero ODOL 2027 di Jakarta, Rabu (4/11).

Menurut Aan, penyidik merupakan garda terdepan dalam menangani pelanggaran ODOL. Karena itu, kapasitas penugas harus dipersiapkan sejak awal melalui penguasaan materi hukum, keterampilan teknis, integritas, serta sikap profesional dalam menjalankan tugas.

Meski pemerintah masih menyempurnakan regulasi pendukung, Aan memastikan bahwa payung hukum yang berlaku saat ini sudah cukup kuat untuk menjadi landasan pengawasan dan penindakan di lapangan.

Di sisi lain, Kemenhub juga terus meningkatkan dukungan teknologi guna mempermudah proses pengumpulan alat bukti hingga pembuktian di pengadilan agar berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Aan mengimbau pemilik barang, operator angkutan, dan pelaku usaha menyamakan pemahaman mengenai pentingnya keselamatan lalu lintas serta perlindungan infrastruktur nasional.

Dia juga mengingatkan seluruh pihak agar menghentikan praktik transaksional atau pemberian imbalan kepada petugas di lapangan.

"Jadi, tidak ada lagi transaksional dengan petugas. Ini tolong juga dari operator, pengemudi, dan sebagainya tidak menggoda petugas untuk bertransaksi dalam zero ODOL," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Rudi Irawan, menjelaskan bahwa pembekalan tersebut juga disesuaikan dengan perkembangan regulasi hukum terbaru, yakni KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023) dan KUHAP (UU Nomor 20 Tahun 2025).

Melalui pelatihan ini, para PPNS dibekali pemahaman teknis mengenai pembuktian fisik kendaraan serta penyamaan persepsi terkait proses penyidikan.

Selain itu, Kemenhub mulai mendorong penerapan sanksi terhadap korporasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum tidak hanya menyasar pengemudi, tetapi juga dapat menjangkau pemilik armada, pengirim barang, hingga industri karoseri yang bertanggung jawab atas pelanggaran.

Kegiatan Persiapan Operasi P21 tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai 4 hingga 6 November 2026 di Jakarta. Sebanyak 63 penyidik dari 33 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) serta Direktorat Jenderal Perhubungan Darat turut mengikuti pelatihan tersebut.

Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan materi mengenai pemeriksaan dimensi kendaraan, tata cara penyidikan sesuai KUHAP terbaru, hingga simulasi studi kasus.

Pelatihan ini juga melibatkan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam proses penegakan hukum.

Melalui kegiatan tersebut, Kemenhub berharap dapat memetakan berbagai kendala operasional yang dihadapi BPTD di daerah sekaligus memastikan penyelesaian berkas perkara hingga tahap P21 atau dinyatakan lengkap dapat berjalan tepat waktu. **(tog)**

# Semifinal Turnamen Brasil U-20 Banjir 51 Kartu Merah

## Uberlandia Esporte Clube (UEC) vs Mamore Ricuh

**UBERLANDIA (Poskota)** - Pertandingan semifinal Divisi 2 Kejuaraan Mineiro U-20 di Brasil berubah menjadi kerusuhan massal. Laga antara Uberlandia Esporte Clube (UEC) melawan Mamore di Stadion Parque do Sabia, Uberlandia, itu diwarnai aksi baku hantam pemain dan ofisial kedua kesebelasan hingga berujung pada keluarnya 51 kartu merah.

Insiden memalukan tersebut berpotensi mencatatkan rekor dunia sebagai pertandingan dengan jumlah pengusiran terbanyak sepanjang sejarah sepak bola. Berdasarkan laporan resmi Federasi Sepak Bola Minas Gerais (FMF), sebanyak 43 pemain dan delapan anggota staf kepelatihan dari kedua tim mendapat kartu merah.

Jumlah tersebut melampaui rekor sebelumnya yang tercatat dalam pertandingan Divisi 5 Liga Argentina pada 2011. Kala itu, wasit mengeluarkan 36 kartu merah akibat keributan di lapangan.

Mengutip laporan Paranaibamais, kericuhan dalam pertandingan UEC kontra Mamore mulai memanas pada babak kedua. Seorang pemain UEC mendapat kartu kuning kedua setelah melakukan aksi pemukulan terhadap lawannya. Keputusan wasit tersebut memicu kemarahan jajaran manajemen tuan rumah yang kemudian masuk ke lapangan.

Situasi semakin tidak terkendali ketika sejumlah pihak terlihat mengintimidasi wasit. Akibatnya, pertandingan sempat dihentikan selama kurang lebih 40 menit.

Kerusuhan mencapai puncaknya ketika pemain Mamore merayakan gol yang dicetak timnya. Selebrasi tersebut memicu provokasi terhadap bangku cadangan UEC. Tidak lama kemudian, pemain dan staf teknis kedua kesebelasan terlibat perkelahian massal.

Bentrokan bahkan semakin meluas setelah enam orang suporter masuk ke lapangan. Mereka diduga ikut menyerang para pemain Mamore sehingga situasi semakin sulit dikendalikan.

Dalam laporan resminya, wasit mencatat empat pemain menerima kartu merah ketika pertandingan masih berlangsung. Sementara itu, 39 pemain lainnya baru mendapat hukuman kartu merah setelah laga dinyatakan berakhir.

Tidak hanya mencatatkan keributan antarpemain, pertandingan tersebut juga diwarnai dugaan ancaman pembunuhan oleh sejumlah petinggi klub UEC terhadap pihak lawan. Laporan wasit turut mengungkap kerusakan parah di area ruang ganti yang digunakan tim Mamore.

Pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Mamore 3-1 itu akhirnya meninggalkan persoalan serius di luar lapangan.

Manajemen Mamore tidak tinggal diam. Mereka resmi melaporkan dugaan pengancaman tersebut kepada kepolisian. Selain meminta proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, Mamore juga mendesak agar UEC dicoret dari kompetisi.

Kasus ini menjadi sorotan dunia sepak bola Brasil. Selain mencoreng penyelenggaraan kompetisi usia muda, insiden tersebut memperlihatkan bagaimana pertandingan sepak bola dapat berubah menjadi aksi kekerasan massal ketika emosi pemain, ofisial, hingga suporter tidak terkendali. **(ruh)**



# Shayne Pattynama Belum Dipercaya Persija

## Masa Depan di Macan Kemayoran Mulai Dipertanyakan

**JAKARTA (Poskota)** - Nasib Shayne Pattynama di Persija Jakarta semakin menjadi tanda tanya. Bek kiri berusia 28 tahun itu kembali tidak mendapat kesempatan bermain saat Macan Kemayoran ditahan imbang PSMS Medan dengan skor 1-1 dalam lanjutan I.League Cup 2026/2027, Selasa (3/11).

Padahal, sebelumnya pelatih Persija, Shin Tae Yong, sempat memberikan sinyal bakal membuka kesempatan bagi Shayne untuk menjadi salah satu pilihan utama di sektor bek kiri. Namun, kenyataannya, pemain yang pernah memperkuat Viking FK tersebut kembali hanya menghuni bangku cadangan.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Sumatra Utara itu, Shin lebih memilih Pratama Arhan sebagai starter. Mantan pemain PSIS Semarang tersebut dipercaya tampil penuh selama 90 menit. Sementara Dony Tri Pamungkas juga mendapat kesempatan bermain sejak menit ke-67.

Kondisi tersebut semakin memperlihatkan sulitnya Shayne menembus tim utama Persija. Bukan hanya di ajang Piala Liga, pemain naturalisasi Indonesia itu juga belum sekalipun mendapat kesempatan tampil dalam delapan pertandingan Super League 2026/2027. Bahkan, namanya tidak masuk dalam daftar susunan pemain.

Situasi ini cukup mengundang perhatian. Sebab, Shayne diketahui tidak sedang mengalami cedera. Ia bahkan sempat tampil membela Timnas Indonesia pada final FIFA ASEAN Cup 2026 dan sukses menjalankan tugas sebagai algojo penalti.

Belum ada penjelasan secara terperinci mengenai alasan Shin belum memberikan kepercayaan kepada Shayne. Selama ini, alasan yang mengemuka hanya menyebutkan bahwa pemilihan pemain disesuaikan dengan kebutuhan strategi dan kondisi tim.

Di tengah ketidakpastian tersebut, Shayne juga belum memberikan pernyataan terbuka mengenai situasinya di Persija. Ia hanya sempat mengunggah tulisan singkat 'sabar' melalui Instagram Story. Namun, belum dapat dipastikan apakah unggahan tersebut berkaitan dengan minimnya kesempatan bermain di klub atau persoalan lain.

Jika kondisi ini terus berlanjut hingga akhir tahun, bukan tidak mungkin Shayne mulai mempertimbangkan opsi mencari klub lain melalui skema peminjaman.

Apalagi, sebagai pemain yang masih berada dalam usia produktif, kesempatan bermain tentu menjadi kebutuhan penting untuk menjaga performa dan persaingan di level tertinggi.

Meski demikian, Shayne masih terikat kontrak bersama Persija hingga Juni 2028. Artinya, jika ingin mencari kesempatan bermain di klub lain, opsi peminjaman bisa menjadi jalan keluar tanpa harus mengakhiri kerja sama dengan Macan Kemayoran.

Kini, keputusan berada di tangan Shin Tae Yong. Apakah Shayne akan kembali mendapat kesempatan membuktikan kemampuannya atau justru terus menjadi penghuni bangku cadangan, masih menjadi tanda tanya. **(ruh)**



# Calvin Verdonk, Manusia Rekor Liga Champions dari Indonesia

**LILLE (Poskota)** - Calvin Verdonk terus menorehkan catatan istimewa di pentas Liga Champions. Bek kiri Lille OSC tersebut seolah menjadi manusia rekor bagi Indonesia setelah selalu menghadirkan cerita baru dalam setiap penampilannya di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa itu.

Pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah yang lahir di Aceh tersebut perlahan mencatatkan sejarah. Namanya menjadi bagian dari perjalanan Indonesia di Liga Champions, mulai dari masuk daftar susunan pemain hingga dipercaya tampil sebagai starter.

Rekor pertama tercipta pada matchday pertama. Ketika itu, Calvin masuk dalam daftar susunan pemain Lille. Kehadirannya menjadikannya pemain pertama asal Indonesia yang tercatat dalam pertandingan Liga Champions.

Sejarah berikutnya tercipta pada matchday kedua ketika Lille menghadapi Arsenal. Calvin mendapat kesempatan tampil sebagai pemain pengganti. Meski hanya bermain selama 12 menit, penampilan tersebut membuatnya menjadi pemain Indonesia pertama yang merasakan langsung atmosfer pertandingan Liga Champions.

Catatan bersejarah itu semakin bertambah pada matchday ketiga. Pelatih Davide Ancelotti memberikan kepercayaan kepada Calvin untuk tampil sejak menit pertama sebagai bek kiri saat Lille menghadapi Galatasaray.

Meski Lille harus mengakui keunggulan lawan, Calvin tetap mendapat kesempatan bermain penuh selama 90 menit. Statusnya sebagai pemain Indonesia pertama yang menjadi starter di Liga Champions pun tercatat dalam sejarah.

Memasuki matchday keempat, kepercayaan pelatih kembali diberikan kepada Calvin. Dia kembali masuk starting eleven ketika Lille menghadapi Bodo/Glimt.

Tidak ada rekor baru yang tercipta dalam pertandingan tersebut. Namun, Calvin kembali mencuri perhatian setelah dinobatkan sebagai Man of the Match atau pemain terbaik pertandingan.

Empat pertandingan, empat cerita berbeda. Konsistensi Calvin mendapatkan kesempatan bermain sekaligus memperlihatkan bahwa dirinya mampu bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa.

Perjalanan tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi sepak bola Indonesia. Calvin tidak sekadar membawa nama klubnya, tetapi juga mencatatkan sejarah bagi pemain Indonesia di kompetisi elite Eropa.

Tantangan berikutnya sudah menanti pada matchday kelima. Lille dijadwalkan menjamu raksasa Jerman, Bayern Muenchen, pada akhir November mendatang. Jika kembali dipercaya tampil, Calvin berpeluang menambah catatan istimewanya di Liga Champions.

Bukan hanya di kompetisi Eropa, peluang Calvin untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak di Ligue 1 juga terbuka. Selama ini, Romain Perraud lebih sering mendapat kepercayaan tampil di kompetisi domestik dibandingkan pemain berdarah Aceh tersebut.

Penampilan positif Calvin di Liga Champions bisa menjadi pertimbangan bagi Ancelotti untuk memberikan kesempatan lebih besar kepadanya di Ligue 1.

Jika mampu menjaga konsistensi, bukan tidak mungkin Calvin akan semakin menjadi pilihan utama Lille. Perjalanannya sejauh ini sekaligus membuktikan bahwa pemain Indonesia memiliki peluang untuk bersaing dan mencatatkan prestasi di panggung sepak bola tertinggi Eropa. **(ruh)**




# Persib Sapu Bersih Empat Laga dan Lolos ke 16 Besar ACL 2

**BANDUNG (Poskota)** - Persib Bandung memastikan langkah ke babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 dengan catatan sempurna. Maung Bandung menyapu bersih empat pertandingan fase Grup E setelah menumbangkan Melbourne Victory 2-1 dalam laga dramatis di Stadion AAMI Park, Australia, Rabu (4/11).

Kemenangan tersebut tidak hanya mengantarkan Persib ke fase gugur, tetapi juga menjadi bukti mentalitas pantang menyerah anak asuh Igor Tolic. Sempat tertinggal lebih dulu, Pangeran Biru mampu membalikkan keadaan melalui dua gol pada lima menit terakhir pertandingan.

Persib bahkan harus menerima kenyataan pahit setelah Julio Cesar mencetak gol bunuh diri pada menit ke-71. Gol tersebut membuat Melbourne Victory unggul 1-0 dan menempatkan Maung Bandung dalam tekanan.

Namun, Persib tidak menyerah. Perubahan strategi yang dilakukan Tolic pada babak kedua menjadi titik balik kebangkitan tim asal Kota Bandung tersebut.

Tolic mengubah struktur pertahanan dengan menarik keluar seorang bek tengah dan menerapkan formasi empat bek sejajar. Strategi itu membuat Persib lebih leluasa mengeksploitasi sektor sayap sekaligus menemukan celah di lini pertahanan tuan rumah.

Pergantian sejumlah pemain juga memberikan tenaga baru bagi Persib untuk meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, Luka Menalo menyamakan kedudukan pada menit ke-85 sebelum Balsa Sekulic memastikan kemenangan dramatis lewat gol pada menit ke-90.

Pelatih Persib Igor Tolic mengaku bangga dengan respons para pemainnya, terutama setelah tim tertinggal lebih dahulu.

"Pertandingan berjalan 50-50. Kami sempat berada dalam tekanan dan tertinggal lebih dulu setelah kebobolan gol. Namun, reaksi para pemain luar biasa. Kami langsung mengubah struktur, memasukkan pemain-pemain yang bugar, dan memanfaatkan celah di lini belakang mereka untuk berbalik menyerang dan mencetak gol-gol yang indah," ujar Tolic dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Menurutnya, perubahan taktik dan kesegaran pemain menjadi faktor penting berhasilnya Persib melakukan comeback. Strategi tersebut membuat Maung Bandung mampu mengambil alih permainan pada menit-menit akhir.

"Saya rasa gol-gol yang sangat indah," tambahnya.

Tambahan tiga poin membuat Persib semakin kokoh di puncak klasemen sementara Grup E dengan koleksi 12 poin dari empat pertandingan. Sebelum mengalahkan Melbourne Victory di Australia, Persib juga berhasil menundukkan FC Seoul, Viettel FC, serta Melbourne Victory pada pertemuan pertama di Bandung.




Catatan tersebut sekaligus mengukuhkan Persib sebagai salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan di kompetisi antarklub Asia. Lebih istimewa lagi, Maung Bandung mencatatkan sejarah sebagai tim Indonesia pertama yang mampu mengalahkan Melbourne Victory di kandangnya sendiri di Australia.

Meski sudah memastikan satu tempat di babak 16 besar, Persib masih memiliki dua pertandingan tersisa di fase grup, yakni menghadapi FC Seoul dan Viettel FC. Situasi ini membuka peluang bagi Tolic untuk melakukan rotasi pemain demi menjaga kebugaran skuad.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat padatnya agenda Persib sepanjang musim 2026/2027. Selain ACL 2, Pangeran Biru juga harus membagi konsentrasi di ASEAN Club Championship (ACC), Super League, dan League Cup.

Khusus November ini, Persib dijadwalkan menjalani tujuh pertandingan. Setelah menuntaskan laga melawan Tsenmulang Kalteng FC dan Melbourne Victory dengan hasil positif, Maung Bandung masih harus menghadapi Java United, Shan United di ACC, Bali United, FC Seoul di ACL 2, serta Persita Tangerang.

Dengan jadwal yang padat, kebugaran fisik dan kesiapan mental pemain menjadi pekerjaan rumah bagi Tolic. Rotasi yang tepat dibutuhkan agar performa tim tetap terjaga sekaligus menjaga peluang Persib meraih prestasi di seluruh kompetisi yang diikuti.

Keberhasilan menyegel tiket 16 besar dengan nilai sempurna menjadi modal berharga bagi Persib. Namun, perjalanan Maung Bandung belum berakhir. Konsistensi permainan dan kemampuan menjaga kondisi pemain akan menjadi penentu langkah mereka menghadapi persaingan yang semakin ketat pada musim ini. **(ruh)**

Berita dari halaman 1

## Perpustakaan Si Atang Bantu UMKM Tangerang Naik Kelas

Melalui payung program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TP-BIS) besutan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Si Atang menjelma menjadi rumah kedua bagi warga untuk menimba ilmu praktis, mengasah keterampilan, hingga merintis jalan menuju kesejahteraan.

Pengelola Perpustakaan Si Atang, Maryono, menuturkan bahwa kehadiran perpustakaan ini sejak awal diniatkan untuk menghadirkan denyut nadi perubahan yang nyata di tengah masyarakat. Bukan sekadar menumbuhkan minat baca, tetapi juga merawat harapan agar warga kian berdaya.

"Perpustakaan Si Atang ini bukan hanya untuk meminjam dan membaca buku saja. Kami ingin keberadaannya bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat agar mereka lebih mandiri dan bisa lebih maju," ujar Maryono saat ditemui di lokasi, Rabu (4/11).

Dalam praktiknya, roda pemberdayaan itu berputar melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan intensif bagi para pelaku usaha mikro, kecil, and menengah (UMKM). Ruang-ruang baca yang biasanya sunyi, kerap berubah riuh oleh diskusi hangat para warga yang antusias menimba ilmu seputar tata kelola bisnis hingga manajemen keuangan yang sehat.

Bagi Maryono dan timnya, antusiasme warga adalah bahan bakar utama. Perpustakaan kini bukan lagi ruang sunyi, melainkan titik temu di mana ide-ide kreatif diasah dan dibagikan dari mulut ke mulut, dari satu meja diskusi ke meja lainnya.

"Masyarakat merasa senang dan sering datang untuk belajar bersama, terutama untuk mengembangkan usaha mereka. Kami juga memberikan pembelajaran seperti pengelolaan keuangan dan lainnya," kata Maryono dengan nada penuh antusias.

Buah dari ketekunan itu mulai ranum dipetik. Sejumlah produk UMKM lokal binaan Perpustakaan Si Atang kini menunjukkan geliat positif. Dengan pendampingan yang tepat, produk-produk rumahan tersebut perlahan naik kelas, kian percaya diri melangkah menembus ketatnya persaingan pasar, bahkan menyimpan asa menembus gerbang ekspor global.

"Alhamdulillah, usahanya sudah berjalan dan bisa bersaing di pasar. Bahkan, kami juga berharap produk-produk tersebut bisa berkembang hingga ke luar negeri," tuturnya penuh optimisme.

Maryono tak menampik, seluruh pencapaian ini tidak lepas dari keberhasilan mengawinkan misi literasi dengan program TPBIS Perpusnas. Langkah strategis ini diyakininya mampu memperluas jangkauan kontribusi sosial perpustakaan, langsung menyentuh denyut ekonomi akar rumput di Kota Tangerang.

"Kami bisa terus berkontribusi kepada masyarakat melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang telah kami jalankan. Program ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di sekitar," ungkapnya.

Lebih jauh, ia berharap denyut kegiatan di Perpustakaan Si Atang tidak berhenti pada peningkatan kapasitas individu saja, melainkan bermuara pada muara akhir yang dicita-citakan bersama: peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga Kota Tangerang secara menyeluruh.

"Dengan begitu, kami bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan para pelaku UMKM," pungkasnya mantap.

Kendati telah menorehkan secercah harapan bagi warga Periuk, Maryono menyimpan sebuah asa yang belum usai. Ia berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dapat melirik dan memberikan perhatian lebih substansial terhadap keberadaan perpustakaan masyarakat di tingkat kelurahan.

Bagi Maryono, perpustakaan kelurahan selayaknya tidak lagi dipandang sebelah mata hanya sebagai gudang buku pinjaman, melainkan diperlakukan sebagai aset strategis daerah—sebuah simpul penting dalam merajut peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial di tingkat tapak.■

Berita dari halaman 1

## "Jadilah Seperti Bunga"

Tak kurang 350.000 jenis fauna dan 25.000 flora ada di Indonesia.

Kita memiliki tiga bunga nasional dan tiga satwa kebanggan yang melambangkan keindahan, kelangkaan dan pesona alam Indonesia.

Tiga bunga dimaksud, melati sebagai puspa bangsa, anggrek bulan sebagai puspa pesona dan padma raksasa sebagai puspa langka. Ketiganya menjadi simbol keindahan dan identitas bangsa. Sedangkan ketiga satwa adalah komodo, ikan siluk merah, dan elang Jawa, yang mewakili satwa darat , air dan udara.

Kekayaan ini sebagai anugerah yang wajib dijaga dan dilindungi agar tidak punah tergusur perubahan zaman, apalagi oleh tangan - tangan jahil oknum yang dengan sengaja merusak habitat flora dan fauna.

Upaya menjaga lingkungan sejatinya sudah dilakukan sejak lama,

baik secara individu, kelompok maupun institusi seperti memperbanyak taman bunga, taman buah di lingkungan sekitar. Terlebih warga Indonesia secara turun temurun gemar bercocok tanam, setidaknya menanam pohon.

Mencegah kerusakan lingkungan juga dilakukan melalui Keppres No 4 Tahun 1993 dengan menetapkan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) yang diperingati setiap tanggal 5 November.

Ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengingatkan akan pentingnya puspa dan satwa dalam kehidupan manusia. Puspa berarti bunga (lebih luas adalah flora), sedangkan satwa adalah hewan atau binatang (fauna).

Zaman berganti tak bisa dihindari, alih generasi pasti terjadi, tetapi melestarikan kekayaan hayati tidak lantas terhenti.

Data menyebutkan setiap tahunnya negara kita kehilangan ratusan ribu hektar hutan. Selain alih fungsi lahan, penebangan liar, kebakaran hutan, penambangan dan infrastruktur menjadi faktor penyebab deforestasi.

Berkurangnya "kawasan hijau" berakibat hilangnya habitat puspa dan sat wa, yang pada gilirannya dapat memusnahkan sejumlah spesies satwa.

Kadang, permasalahan lingkungan acap berulang dan nyaris sama, tetapi sepertinya belum terdapat solusi jitu untuk mengatasinya sehingga kerusakan alam beserta isinya, termasuk puspa dan satwa terus saja terjadi.

Sementara kita paham benul, rusaknya lingkungan alam pada suatu masa, belum tentu dapat dikembalikan seperti habitat semula, meski sudah 10 masa berikutnya memperbaikinya.

Tentu kita tak ingin kekayaan hayati itu punah seiring dengan kian meningkatnya kerusakan lingkungan dan kepunahan hutan. Kita tak inginkan dari 250.000 ragam serangga yang kita miliki saat ini sepuluh tahun lagi tinggal separuhnya.

Sayang kalau lebih dari 1.700 jenis burung, ratusan di antaranya langka di dunia, memasuki Indonesia Emas, tak bisa lagi terbang tinggi karena punah habitatnya.

Kian dituntut meneguhkan kualitas dan integritas diri yang disertai ketulusan untuk Cinta Puspa dan Satwa Nasional dengan mengedapankan perilaku peduli lingkungan melalui aksi nyata,bukan sebatas euforia.

Bukankah, melepas burung di alam bebas sebagai simbol pembukaan acara (grand opening), lebih bermakna ketimbang pelepasan balon ke udara.

Tak kalah pentingnya memperbanyak hutan kota di setiap daerah,bila perlu hingga tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai ruang terbuka hijau, sekaligus objek wisata daerah guna memberi nilai tambah.

Di sisi lain, pemerintah harus terus bergerak menghentikan semua aktivitas yang dapat merusak lingkungan hidup. Penegakan hukum tanpa tebang pilih kian mendesak. Begitu juga regulasi yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam mengelola hutan, sumber daya alam, lahan pertanian dan perkebunan.

Mengatasi masalah lingkungan perlu kebijakan konkret, bukan sebatas gerakan moral berupa ajakan atau imbauan pemerintah. Masyarakat akan terlibat aktif menjaga lingkungan sekitar, jika kebijakan yang digulirkan pemerintah memihak dan memberi manfaat nyata bagi kehidupan mereka, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom "Kopi Pagi" di media ini.

Kita diberi karunia akal agar mampu olah pikir bagaimana menyeimbangkan pola hidup serasi dan bersahabat dengan lingkungan, bukan merusaknya.

Ini bisa dimulai sejak dini melalui kebiasaan ( habit) dalam lingkungan keluarga. Dalam filosofi berbahasa Jawa disebut : Memayu hayuning bawana –artinya menciptakan keindahan bagi alam semesta.

Jika peduli lingkungan terus menerus dipraktikkan dalam kehidupan sehari - hari, pada saatnya membentuk karakter.Kemudian, melaksanakannya tanpa harus diminta.

Memperindah lingkungan didasari ketulusan, tidak pula dipamerkan, tak ubahnya bunga mawar yang menebarkan keharuman ke sekelilingnya. Mari tebarkan keharuman, bukan aroma kebusukan, terlebih menimbulkan kegaduhan.

Itulah cinta puspa dan satwa yang hendaknya dikemas dan digeloraka melalui aksi nyata, mulai dari diri sendiri.Meski hanya sebagian kecil dari sikap peduli lingkungan, tetapi sangat bermanfaat, jika menjadi gerakan massal. (*).

Berita dari halaman 1

## Siapa Aktor Intelektual di Balik Penyadapan Presiden?

Senada, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menegaskan pengusutan perkara harus menjangkau seluruh rantai pertanggungjawaban, mulai dari pelaksana hingga pihak yang merancang dan memerintahkan penyadapan.

Menurut Kholid, dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden bukan perkara biasa karena menyangkut kerahasiaan negara, keamanan komunikasi kepresidenan, serta kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan.

"Usut secara menyeluruh, dari pelaksana hingga aktor intelektualnya. Telusuri siapa yang merancang, siapa yang memberi perintah, siapa yang menerima hasil sadapan, dan untuk kepentingan apa hasilnya digunakan. Semua harus dibuktikan melalui proses hukum yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Kholid.

Ia mengingatkan penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Namun, seluruh proses penyidikan tetap harus berlandaskan bukti dan menjunjung asas praduga tak bersalah.

Kholid juga menyoroti pentingnya pembatasan kewenangan penyadapan. Menurutnya, tindakan tersebut hanya boleh dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, memiliki tujuan yang sah, serta berada di bawah pengawasan yang efektif.

Lebih jauh, PKS meminta kasus ini menjadi momentum pembenahan internal Polri agar tidak menjadi alat politik maupun instrumen kepentingan kelompok tertentu.

"Polri harus setia kepada negara, tunduk pada konstitusi dan hukum, serta mengabdi kepada kepentingan nasional. Jangan pernah jadikan Polri sebagai alat politik atau instrumen untuk melayani kepentingan kekuasaan tertentu. Integritas, profesionalitas, dan sikap tidak memihak merupakan fondasi kepercayaan rakyat kepada Polri," ujarnya.

PKS juga mendorong penguatan sistem keamanan komunikasi kepresidenan, audit menyeluruh terhadap tata kelola penyadapan, serta perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Pengawasan internal dan eksternal, termasuk melalui fungsi pengawasan DPR, dinilai perlu diperkuat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengapresiasi langkah Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Namun, ia berharap pengusutan tidak hanya menyelesaikan perkara yang telah terungkap, tetapi juga membongkar kemungkinan praktik serupa yang pernah menyasar masyarakat sipil.

Hasto menilai penyadapan ilegal yang disertai penghapusan data elektronik dan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, demokrasi, dan sistem hukum nasional.

"Penyadapan secara ilegal yang disertai penghapusan data elektronik hingga akses ilegal bukan hanya bentuk penyalahgunaan kewenangan, tapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sangat serius terhadap hak demokrasi dan sistem hukum nasional. Terlebih penyadapan ditujukan kepada Presiden Prabowo sebagai kepala negara. Maka ini merupakan tindakan makar yang tidak boleh ditolerir," kata Hasto. Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum untuk membungkam masyarakat yang kritis, termasuk jurnalis, kelompok sipil, dan tokoh politik yang memperjuangkan keadilan serta demokrasi.

Menurut Hasto, keberanian anggota internal Polri yang melaporkan dugaan penyadapan tersebut patut diapresiasi. Langkah itu menunjukkan masih adanya kekuatan moral dan integritas di lingkungan kepolisian. "Jajaran internal Polri yang melaporkan penyadapan ilegal tersebut adalah cerminan bahwa kekuatan hari nuraniah yang berbicara. Ini adalah moral force, kekuatan moral yang selalu hadir di tengah kegelapan," ungkapnya. Hasto menegaskan kewenangan aparat yang melekat pada jabatan publik tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis, pribadi, maupun kelompok tertentu. Institusi penegak hukum harus tetap berdiri di atas kepentingan negara dan masyarakat.

"Setiap jabatan publik, terlebih yang memiliki kewenangan menggunakan upaya paksa atas nama negara, harus dilandasi moral, etika, dan sikap kenegarawanan. Institusi penegak hukum harus dijauhkan dari agenda politik praktis, kepentingan pribadi atau kelompok, termasuk kepentingan ambisi kekuasaan mantan pejabat negara," tegasnya. PDI Perjuangan berharap pengusutan perkara tersebut menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan kewenangan lain yang menjadikan instrumen negara sebagai alat kriminalisasi terhadap masyarakat.

**Cabut Bintang Mahaputera**

Secara terpisah, Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, berharap Presiden Prabowo Subianto mencabut tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna yang diberikan kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Desakan tersebut menyusul terseretnya Listyo dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Menurut Hasanuddin, tanda kehormatan negara bukan sekadar penghargaan atas jasa seseorang, melainkan juga mencerminkan integritas moral, keteladanan, serta komitmen terhadap bangsa dan negara. Karena itu, dugaan pelanggaran yang menyeret Listyo dinilai perlu menjadi perhatian serius Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

"Penghargaan negara seperti Bintang Mahaputera bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi juga melekat tanggung jawab moral dan keteladanan," ujar Hasanuddin.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai, pemerintah perlu memastikan setiap penerima penghargaan negara tetap memenuhi persyaratan dan nilai-nilai yang menjadi dasar pemberian tanda kehormatan tersebut. Listyo Sigit diketahui menerima Bintang Mahaputera Adipurna dari Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, ketika masih menjabat sebagai Kapolri.

Bintang Mahaputera merupakan tanda kehormatan tertinggi kedua di Indonesia setelah Bintang Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan Presiden kepada individu, institusi, maupun organisasi sipil yang dinilai memiliki jasa luar biasa kepada bangsa dan negara serta berkontribusi menjaga kedaulatan negara.

Tanda kehormatan Bintang Mahaputera memiliki lima tingkatan. Adapun Bintang Mahaputera Adipurna merupakan tingkatan tertinggi dalam kategori tersebut. Hasanuddin menjelaskan, pencabutan tanda kehormatan memiliki landasan hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Dalam Pasal 35 disebutkan, Presiden berwenang mencabut tanda kehormatan apabila penerimanya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 25.

Persyaratan tersebut antara lain memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, serta setia kepada negara dan tidak mengkhianati bangsa.

Atas dasar itu, Hasanuddin meminta Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mengkaji persoalan yang menyeret mantan Kapolri tersebut secara menyeluruh. Ia menegaskan, proses evaluasi harus dilakukan secara objektif agar keputusan pemerintah memiliki landasan yang kuat.

"Saya mendorong agar kajian dilakukan secara objektif dan komprehensif, sehingga pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam mengambil keputusan," katanya.

Hasanuddin berharap pemerintah konsisten menjaga kehormatan setiap tanda jasa dan tanda kehormatan negara. Dengan demikian, penghargaan yang diberikan negara tidak kehilangan nilai, wibawa, maupun kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, kehormatan sebuah penghargaan negara tidak hanya ditentukan oleh proses pemberiannya, tetapi juga oleh integritas dan perilaku pihak yang menerimanya.

**Dicopot dari Jabatan KSP**

Sebagai tindaklanjut penetapan tersangka, Prasetyo mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Kepunisan tersebut diambil setelah Listyo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden. Prasetyo mengatakan, keputusan Presiden Prabowo diambil dengan mempertimbangkan status hukum Listyo yang kini menjadi salah satu tersangka dalam perkara tersebut.

"Salah satu tersangka adalah beliau menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Oleh karena itu, dapat kami sampaikan bahwa pagi hari ini Bapak Presiden telah mengambil keputusan berkenaan dengan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo sebagai KSP," ujar Prasetyo.

Dengan keputusan tersebut, jabatan KSP untuk sementara mengalami kekosongan. Namun, Presiden langsung menunjuk pejabat pelaksana tugas (Plt) guna memastikan roda organisasi tetap berjalan.

Prasetyo menyebut, Prabowo telah menunjuk Letjen Aryo Windutomo untuk mengisi posisi tersebut sebagai Plt Kepala Staf Kepresidenan. "Dan untuk selanjutnya Bapak Presiden menunjuk Plt untuk mengisi kekosongan tersebut. Untuk sementara beliau menunjuk Letjen Aryo Windutomo untuk menjabat sebagai Plt KSP," imbuhnya.

Penunjukan Aryo Windutomo dilakukan untuk menjaga keberlangsungan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden selama proses penentuan pejabat definitif. **(ruh)**

Berita dari halaman 1

## Pejalan Kaki Tersungkur Diseret Jambret

Korban kemudian mendapatkan penanganan medis awal dari tim Dokkes Polres Metro Jakarta Pusat untuk memastikan kondisinya tetap stabil.

Egy memuturkan, korban juga telah membuat laporan polisi. Saat ini, aparat gabungan dari Polsek Sawah Besar dan Polres Metro Jakarta Pusat tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku.

"Selanjutnya untuk tim saat ini bergabung dengan tim dari Polres, Resmob, tim Reskrim. Unit Reskrim Polsek itu sudah bergabung dengan tim Resmob sedang menyusur TKP cari petunjuk CCTV-nya," jelas Egy.

Berdasarkan keterangan korban, kalung emas yang diperkirakan memiliki berat 20 gram itu tidak seluruhnya berhasil dibawa kabur. Sebagian perhiasan masih tersangkut dan dipegang korban sehingga mengalami kerusakan. Pelaku hanya berhasil membawa sebagian kecil kalung tersebut.

"Kalung, tapi sebenarnya kalungnya masih dipegang sehingga rusak, katanya hanya sebagian kecil saja terbawa, kecil," ungkap Egy.

Sementara itu, Edison mengungkapkan, dirinya sama sekali tidak menyangka menjadi sasaran penjambretan ketika sedang berjalan pagi bersama tiga rekannya. Pelaku datang secara tiba-tiba dari belakang saat rombongan mereka hendak menyeberangi Jalan Samanhudi.

Tak hanya dirinya, Edison juga mengaku melihat seorang perempuan yang berada sekitar 20 meter di depan rombongannya turut menjadi korban penjambretan. Perempuan tersebut diduga kehilangan kalung emas akibat aksi kelompok pelaku.

Dugaan adanya aksi penjambretan terhadap korban lain itu kini menjadi salah satu informasi yang dapat membantu kepolisian dalam mengembangkan penyelidikan. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi serta menelusuri rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian. Tim gabungan juga dikerahkan untuk mengidentifikasi kendaraan dan memburu pelaku. **(ruh)**

Berita dari halaman 1

## Aksi Penolakan Konser Andrea Bocelli di JIExpo Kemayoran Ricuh

"Para korban telah mendapatkan penanganan medis, sementara tiga personel masih menjalani perawatan lebih lanjut di rumah sakit," ujar Budi kepada awak media, Rabu (4/11).

Menurut Budi, pengamanan dilakukan bersama TNI dan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Aparat mengedepankan pendekatan komunikasi dan dialog untuk mengarwal kedua kegiatan agar berlangsung aman serta tidak mengganggu keselamatan masyarakat.

Aksi penolakan terhadap konser tersebut mulai berlangsung sejak sore hari. Petugas gabungan kemudian melakukan komunikasi dengan peserta aksi guna menjaga situasi tetap kondusif. Bahkan, pertemuan antara perwakilan massa penolak konser dan pihak penyelenggara digelar untuk membahas aspirasi yang disampaikan. "Sudah dilakukan audiensi dan pertemuan antara pihak yang menyampaikan penolakan dengan penyelenggara," ungkap Budi.

Namun, situasi yang semula diupayakan tetap kondusif justru meningkat setelah audiensi. Sejumlah orang melakukan pelemparan batu ke arah petugas pengamanan hingga mengakibatkan puluhan personel dan seorang warga mengalami luka-luka.

Meski terjadi kericuhan, Budi menegaskan kepolisian tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Namun, penyampaian aspirasi harus dilakukan sesuai ketentuan dan tidak disertai tindakan yang membahayakan orang lain.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk menyampaikan pendapat secara tertib, mengedepankan dialog, serta menghindari tindakan pelemparan, kekerasan maupun perusakan yang dapat membahayakan peserta, petugas, dan masyarakat lainnya," tandasnya. **(man)**

POSKOTA
Media Independen

Diterbitkan oleh : PT Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta
Pendiri : H. Harmoko (Almarhum), H. Tahar (Almarhum), Yachya Suryawinata (Almarhum)

Direktur Utama/Pemimpin Umum : H. Azisoko
Direktur Operasional : Aby Iskandar
General Manager: Achmad Jani
Pemimpin Redaksi: H. Joko Lestari
Wakil Pemimpin Redaksi: Guruh Nara Persada

Pemasaran: Melinda Ratri (Manager), - Astried Kharisma, - Herri Effendi

Kontak Redaksi : 021 – 22129129
Kontak Iklan : 0811-8872-888

Koordinator Liputan: Deny Zainuddin
Redaktur : Fernando Toga Mandalo, Winoto Anung, Febrian Hafizh Muchtamar,
Wartawan : Angga Pahlevi, Rahmat Haryono, Veronica Prasetio, Samsul Fatoni, Dadan Sukmana, Ramot Sormin, Ali Mansur
Desain Grafis : Widi Pramudio, Hiryanto, Bambang Wahyudi.
IT : Agus Hikmat Nugraha, Muhammad Fauzan.
Alamat Redaksi : Jl. Bang Pitung no. 22/5 Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. E-mail: redaksi@poskota.co.id

www.poskota.co.id

# SBY Minta Prabowo Hidupkan Politik Berkeadaban

❍ Prihatin Kondisi Politik RI

**JAKARTA (Poskota)** - Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi politik nasional yang dinilai semakin liar. Ia mengingatkan, perebutan kekuasaan tidak boleh menghalalkan segala cara, terlebih jika mengabaikan nilai moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut disampaikan di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka.

Melalui akun X miliknya, Rabu (4/11), SBY mengungkapkan kegelisahannya melihat perkembangan politik yang terjadi belakangan ini. Ia mempertanyakan arah kehidupan politik nasional yang dinilainya semakin jauh dari prinsip-prinsip kepatutan.

"Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita," tulis SBY.

Menurut SBY, dinamika politik saat ini memperlihatkan kecenderungan bahwa segala cara seolah dibenarkan demi memperoleh kekuasaan atau political power. Padahal, upaya meraih kekuasaan seharusnya tetap berpijak pada moralitas, etika, dan aturan hukum.

Ia mengingatkan, kondisi politik yang tidak sehat berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Bahkan, bukan tidak mungkin rakyat kehilangan rasa aman dan nyaman ketika menjalani kehidupan di negaranya sendiri.

"Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apa pun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral. Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tenteram hidup di negaranya sendiri," ujar SBY.

Mantan Presiden dua periode itu pun meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil peran dalam mengembalikan kehidupan politik nasional ke jalur yang lebih bermartabat. Menurutnya, membangun politik yang berkeadaban merupakan tanggung jawab besar sekaligus panggilan sejarah bagi seorang pemimpin negara.

"Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, seperti juga warga negara Indonesia yang lain, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Ini panggilan sejarah," katanya.

Keprihatinan SBY tersebut muncul ketika Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Selain Listyo Sigit, dua tersangka lainnya adalah Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan tersebut berlangsung sepanjang periode 2025-2026. Ketiga tersangka diduga memerintahkan pemasangan sejumlah nomor telepon ke dalam perangkat penyadapan milik Polri tanpa melalui prosedur dan mekanisme verifikasi yang semestinya.

Salah satu nomor yang diduga dimasukkan ke perangkat tersebut merupakan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

"Kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan, atau adanya proses penegakan hukum," kata Asep.

Selain Presiden Prabowo, penyadapan ilegal itu diduga menyasar sejumlah kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ormas), politikus hingga media massa.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan hukum. Di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.

Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun, serta Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun.

Kasus tersebut menambah sorotan terhadap dinamika politik dan penegakan hukum nasional. Pesan SBY menjadi pengingat bahwa persaingan memperoleh kekuasaan harus tetap berada dalam koridor hukum, moralitas, dan etika demokrasi. **(ruh)**

# PKS Bidik 87 Kursi DPR pada Pemilu 2029

❍ Perkuat Relawan dan Saksi



Bachtiar Firdaus
*Ketua DPP PKS Bidang Relawan dan Saksi Nasional (BRSN)*

**JAKARTA (Poskota)** - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai memanaskan mesin politik menghadapi Pemilu 2029. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat konsolidasi organisasi relawan dan saksi guna membangun sistem kerja elektoral yang profesional, adaptif, dan berintegritas.

Penguatan tersebut dilakukan sejak dini dengan membenahi struktur organisasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperluas jaringan relawan hingga ke berbagai elemen masyarakat. PKS menilai pola kerja elektoral harus menyesuaikan perkembangan regulasi, perubahan perilaku masyarakat, dan karakteristik pemilih.

Ketua DPP PKS Bidang Relawan dan Saksi Nasional (BRSN), Bachtiar Firdaus, mengatakan, pendekatan dalam membangun organisasi relawan dan saksi tidak bisa lagi menggunakan pola lama. Terlebih, sekitar 60 persen pemilih pada pemilu mendatang berasal dari kalangan generasi muda.

"Karena itu, organisasi relawan dan saksi harus mampu beradaptasi," kata Bachtiar, kemarin.

Menurut dia, penguatan organisasi tidak cukup hanya dengan membentuk struktur kepengurusan. Lebih dari itu, diperlukan peningkatan kompetensi, profesionalitas, integritas, serta pemahaman terhadap regulasi dan tata kelola penyelenggaraan pemilu.

Bachtiar menyebut, ada dua paradigma yang harus dikembangkan secara bersamaan, yakni strong core dan open ecosystem.

Paradigma strong core menitikberatkan pada penguatan inti organisasi melalui sumber daya manusia yang kompeten, memiliki integritas, kecakapan, dan komitmen. Sementara open ecosystem mengedepankan pembangunan gerakan yang terbuka, kolaboratif, serta mampu merangkul berbagai kelompok masyarakat.

"Kekuatan inti organisasi harus berjalan beriringan dengan keterbukaan ekosistem. Kita membutuhkan kader dan relawan yang kuat secara kapasitas dan integritas, tetapi pada saat yang sama juga mampu membangun jejaring, berkolaborasi, serta merangkul berbagai elemen masyarakat," ujarnya.

Dia menegaskan, kerja elektoral tidak boleh hanya dilakukan menjelang pesta demokrasi. Aktivitas tersebut harus menjadi bagian dari kehadiran organisasi di tengah masyarakat, terutama dalam merespons berbagai persoalan dan kebutuhan publik.

Dengan demikian, peran saksi tidak sebatas mengawasi jalannya pemungutan suara dan mengamankan perolehan suara pada hari pencoblosan. Mereka juga diharapkan terlibat dalam kegiatan sosial, membangun komunikasi, serta menjalin kolaborasi dengan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (BP3) DPP PKS, Mardani Ali Sera, menekankan pentingnya memperluas ekosistem relawan melalui pendekatan blue ocean. Strategi ini diarahkan untuk membuka ruang kolaborasi dan menjangkau kelompok masyarakat potensial yang selama ini belum terhubung secara optimal dengan gerakan partai.

Menurut Mardani, 2027 harus menjadi momentum untuk mempercepat konsolidasi dan memperluas jaringan organisasi. Peningkatan kapasitas relawan serta calon saksi juga harus menjadi perhatian utama.

"2027 harus menjadi momentum bagi PKS untuk bergerak lebih maju melalui penguatan konsolidasi, perluasan jaringan, dan peningkatan kapasitas seluruh elemen relawan serta calon saksi," katanya.

Mardani mengingatkan, seluruh elemen partai harus terlibat aktif dalam agenda pemenangan. Tidak boleh ada kader maupun relawan yang hanya menjadi penonton ketika persiapan menuju Pemilu 2029 mulai dijalankan.

"Menjadi penonton bukanlah pilihan. Kami berharap seluruh elemen organisasi bergerak aktif, responsif, dan konsisten dalam menjalankan agenda-agenda elektoral," tegasnya.

Dalam konsolidasi tersebut, Mardani juga memaparkan target politik PKS pada Pemilu 2029, yakni meraih 87 kursi DPR RI dengan target perolehan suara nasional sebesar 15 persen.

Target tersebut, kata dia, harus diterjemahkan ke dalam program kerja yang terukur dan berkelanjutan. Karena itu, penguatan manajemen saksi, peningkatan kemampuan relawan, konsolidasi struktur, serta pembangunan jaringan yang terbuka dan kolaboratif harus dipersiapkan sejak sekarang.

Senada, Ketua Departemen Manajemen Saksi, Anton Aryadi, mengatakan konsolidasi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sistem kerja relawan dan saksi yang lebih terstruktur serta berkesinambungan.

Dia berharap, keberadaan relawan dan saksi tidak hanya berorientasi pada kepentingan kontestasi politik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

"Melalui konsolidasi ini, BRSN berkomitmen memperkuat kesiapan organisasi, meningkatkan profesionalitas relawan dan saksi, serta membangun sistem kerja yang solid untuk menyongsong Pemilu 2029," tandas Anton. **(ruh)**



PENYADAPAN • Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap Kepala Negara serta sejumlah pimpinan dan tokoh lainnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (4/11/2026).

# PAN Masih Kaji Putusan MA Soal Ijazah Gibran

**JAKARTA (Poskota)** - Partai Amanat Nasional (PAN) belum menentukan sikap politik terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah. Partai berlambang matahari putih itu masih mempelajari secara menyeluruh putusan tersebut, termasuk implikasi hukumnya.

Meski belum mengambil sikap lebih jauh, PAN menegaskan menghormati putusan pengadilan dan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum. Partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan tersebut juga mengingatkan agar polemik ijazah Gibran diskapi secara hati-hati dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan partainya masih mengkaji kemungkinan langkah politik di DPR menyusul putusan MA tersebut.

"Mengenai proses-proses politik di DPR, PAN masih mengkaji secara cermat berdasarkan konstitusi, undang-undang, serta ketentuan tata tertib DPR," kata Viva, kemarin.

Viva yang kini menjabat Wakil Menteri Transmigrasi itu menegaskan, setiap putusan pengadilan harus dihormati. Namun, menurut dia, putusan MA mengenai suket penyetaraan pendidikan Gibran perlu dipahami secara utuh, baik dari sisi amar putusan maupun konsekuensi hukumnya.

"Putusan MA ini harus kita cermati secara utuh, baik amar putusannya maupun implikasi hukumnya," ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, PAN tetap berkomitmen menjaga konstitusi, supremasi hukum, dan kepentingan negara. Karena itu, polemik yang menyangkut penyetaraan pendidikan Gibran harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan yang berlaku.

"Kita perlu memastikan bahwa persoalan ini diskapi secara jernih, proporsional, dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku," tegasnya.

Viva juga mengingatkan pentingnya menjaga kepastian hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Menurut dia, penyikapan yang tidak proporsional justru berpotensi memperkeruh persoalan yang tengah menjadi perhatian publik tersebut.

Sementara itu, putusan MA mengenai ketidakabsahan suket penyetaraan pendidikan Gibran telah memunculkan beragam respons dari sejumlah partai politik di DPR. Sebagian partai mulai mendorong pembahasan melalui jalur politik dan pengawasan parlemen.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), misalnya, membuka peluang penggunaan hak angket, hak interpelasi, hingga hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR sebagai instrumen untuk menyikapi persoalan tersebut.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB sekaligus Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai DPR memiliki sejumlah kewenangan konstitusional yang dapat digunakan untuk mendalami polemik persyaratan pendidikan Gibran.

Sikap serupa juga menjadi perhatian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai persoalan ijazah menyentuh aspek fundamental karena berkaitan dengan persyaratan konstitusional untuk menduduki jabatan publik.

Namun, Hasto mengingatkan bahwa pengguliran hak angket tidak dapat dilakukan PDIP seorang diri. Dibutuhkan komunikasi dan dukungan politik dari fraksi lain di DPR.

Berbeda dengan PAN yang masih melakukan kajian, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik putusan MA tersebut. Sekretaris Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, menegaskan persyaratan pendidikan merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi setiap orang yang hendak menduduki jabatan publik.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menilai putusan MA tersebut menimbulkan persoalan serius terhadap pemenuhan persyaratan Gibran sebagai wakil presiden.

Dari Partai Gerindra, juru bicara partai Sugiat Santoso meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan penjelasan mengenai suket penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Adapun Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengaku terkejut dengan putusan MA tersebut. Golkar, kata dia, akan mempelajari dan mendalami putusan setelah menerima salinan lengkap dari lembaga peradilan itu.

Beragam respons tersebut menunjukkan polemik ijazah Gibran mulai berkembang menjadi persoalan politik dan ketatanegaraan. Di tengah perbedaan pandangan antarpartai, sikap PAN masih menunggu hasil kajian menyeluruh sebelum menentukan langkah politik selanjutnya. **(ruh)**

# PPP Cirebon Ajak Pengurus Gunakan Akal Sehat Soal Konflik Internal

**CIREBON (Poskota)** - Gejolak internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin memanas. Perseteruan di tingkat pusat kini merembet hingga ke jajaran pengurus wilayah dan cabang.

Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dikabarkan menginstruksikan seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) menyampaikan pernyataan dukungan terbuka terhadap pemberhentian Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum serta Taj Yasin Maimoen dari posisi Sekretaris Jenderal DPP PPP.

Instruksi tersebut diduga merupakan respons atas pernyataan Ketua DPP PPP periode 2020-2025, M. Thobahul Aftoni, yang sebelumnya secara terbuka meremehkan hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP Tahun 2026. Aftoni bahkan menyebut forum tersebut hanya sebagai lelucon dan gertak sambal.

Namun, langkah Mardiono menggalang dukungan dari daerah justru menuai kritik. Informasi yang dihimpun menyebutkan, pengurus DPP PPP telah menerjunkan tim khusus untuk mendata DPW dan DPC yang tidak menjalankan instruksi tersebut.

Pengurus wilayah maupun cabang yang tidak bersedia menyampaikan pernyataan dukungan terbuka dikabarkan akan dicap tidak loyal. Bahkan, mereka terancam dikenai sanksi hingga pencopotan jabatan.

Tekanan tersebut tidak serta-merta membuat seluruh kader di daerah gentar. Sekretaris DPC PPP Kabupaten Cirebon periode 2021-2026, Hisyam Mansyur, menilai instruksi dari Jakarta tidak memiliki kekuatan untuk mengubah ketentuan organisasi maupun menyelesaikan persoalan legitimasi kepemimpinan partai.

"Mau 1.000 kali bikin pernyataan pun tidak ada pengaruhnya. Kementerian Hukum sudah membaca AD/ART PPP, baik dari hasil Muktamar X maupun dari Muktamar lantai 10," kata Hisyam, kemarin.

Menurut Hisyam, Kementerian Hukum tidak akan memproses keputusan Rakornas apabila pelaksanaannya dinilai bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Dia juga menilai langkah pengurus pusat yang meminta dukungan serentak dari daerah justru memperlihatkan rapuhnya legitimasi kepemimpinan Mardiono. Bagnya, pengerahan kekuatan organisasi untuk mendapatkan pernyataan dukungan memunculkan cerminan adanya persoalan kepercayaan diri di tingkat pusat.

Hisyam berpendapat, persoalan mendasar terletak pada proses terpilihnya Mardiono yang menurutnya tidak melalui forum tertinggi partai yang sah.

"Dia hanya mengklaim terpilih melalui sebuah kamar hotel di lantai 10," ujarnya.

Alih-alih memperkuat soliditas partai, Hisyam menilai tekanan terhadap pengurus daerah justru berpotensi memperlebar perpecahan internal PPP. Apalagi, loyalitas kader semestinya dibangun melalui kepatuhan terhadap aturan organisasi, bukan melalui ancaman pencopotan jabatan.

Dia mengingatkan seluruh kader agar tetap menggunakan akal sehat dalam menyikapi dinamika politik internal partai. Menurutnya, kader tidak seharusnya mengikuti setiap instruksi pimpinan apabila dinilai bertentangan dengan aturan organisasi.

"Mari kita gunakan akal sehat. Kita ini manusia, dibekali akal pikiran. Bukan bebek yang ngekor kepada induknya meskipun langkah itu menabrak aturan," pungkasnya.

Polemik tersebut semakin memperlihatkan bahwa konflik internal PPP belum menemukan titik penyelesaian. Tarik-menarik legitimasi di tingkat pusat kini berpotensi mengganggu soliditas kepengurusan hingga ke daerah. **(ruh)**